



Bappeda  
kota Yogyakarta



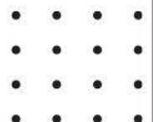
**YK**  
KOTA  
YOGYAKARTA

# **LKIP** Tahun 2023

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



# 2023



**BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA**  
JL. Kenari No. 56 Yogyakarta  
(Kompleks Balaikota Yogyakarta)



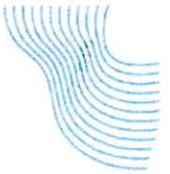
[bappeda.jogjakota.go.id](http://bappeda.jogjakota.go.id)



[bappeda@jogjakota.go.id](mailto:bappeda@jogjakota.go.id)



0274 515207 / 554432



## Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

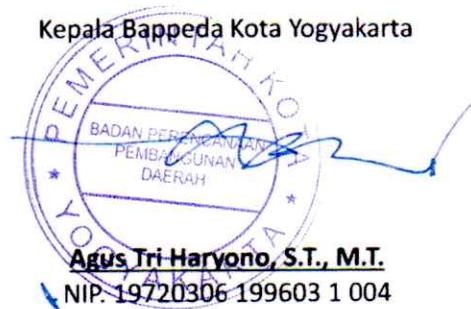
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



**Agus Tri Haryono, S.T., M.T.**  
NIP. 19720306 199603 1 004



# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran, sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98,16% dari target yang direncanakan yaitu 92,5%. Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” telah mencapai target bahkan melampaui dari target yang direncanakan yaitu dengan predikat AA nilai. Target ini sesuai dengan kebijakan dari Tim SAKIP Kota diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Reformasi General Perangkat Daerah sampai Triwulan III dari Inspektorat Kota Yogyakarta.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu dan menjadi perhatian bagi Bappeda Kota Yogyakarta ke depan antara lain :

1. Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 meskipun sudah mengalami penurunan dari target yang ditetapkan tetapi kemiskinan ekstrem masih ada sehingga tetap menjadi fokus untuk diperhatikan dalam rangka untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Persoalan persampahan di Kota Yogyakarta memasuki fase kritis dengan ditutupnya TPA Piyungan sehingga membutuhkan strategi dalam hal pengelolaan persampahan.
3. Jumlah Balita Gizi Buruk dan stunting di Kota Yogyakarta masih tinggi sehingga dibutuhkan strategi untuk penurunan angka stunting.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	4
1.4 Keadaan Pegawai .....	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	14
1.6 Keuangan .....	15
1.7 Sistematika LKIP .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	18
2.1 Perencanaan Strategis .....	18
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	20
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	21
2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	25
2.3 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023 .....	28
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	34
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	35
A.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	56
A. 1. 1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	56
A.1. 2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	58
A.1. 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas.....	59
A.1. 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	68
A.1. 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	74
A.1. 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	77
A.1. 7. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang menysasar 5 kelompok rentan yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.....	91
A.1. 8. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja .....	92
A.1. 9. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja .....	94
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	98
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	106
<b>LAMPIRAN</b>	



## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Pohon Kinerja Bappeda.....	2
Gambar 1.2 Susunan Organisasi Bappeda .....	3
Gambar 1.3 Rumusan masalah dan isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta .....	4
Gambar 1.4 Profil Struktural dan Ketua Tim Kerja Bappeda .....	14
Gambar 3.1 Perbandingan Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran RPD Tahun 2023.....	39
Gambar 3.2 Perbandingan RLS Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023.....	60
Gambar 3.3 Grafik Target, Realisasi, dan Perbandingan Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2023 .....	61
Gambar 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2022.....	62
Gambar 3.5 Grafik Target dan Realisasi Menurunnya Kemiskinan Masyarakat .....	63
Gambar 3.6 Perbandingan Nilai IKLH Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional 2021-2023 .....	64
Gambar 3.7 Nilai Akuntabilitas Pemkot Yogyakarta Tahun 2017-2023 .....	66
Gambar 3.8 Grafik Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023 .....	67
Gambar 3.9 Perbandingan AHH Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 .....	68
Gambar 3.10 Proses Bisnis Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pariwisata .....	78
Gambar 3.11 Proses Bisnis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi .....	80
Gambar 3.12 Proses Bisnis Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .....	82
Gambar 3.13 Proses Bisnis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Menurun .....	83
Gambar 3.14 Proses Bisnis Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ....	84
Gambar 3.15 Proses Bisnis Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan .....	86
Gambar 3.16 Proses Bisnis Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	87
Gambar 3.17 Proses Bisnis Keberdayaan Masyarakat Meningkat.....	88
Gambar 3.18 Proses Bisnis 'Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan' .....	89
Gambar 3.19 Proses Bisnis Sasaran 11 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat .....	90
Gambar 3.20 Struktur Kepengurusan Forum TSL .....	97



## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah pegawai Bappeda Kota Yogyakarta per Desember Tahun 2023.....	5
Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan.....	13
Tabel 1.3 Jumlah pegawai berdasarkan eselon.....	13
Tabel 1.4 Daftar inventaris Bappeda.....	14
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Target Tahunan 2023-2026.....	19
Tabel 2.2 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026.....	19
Tabel 2.3 Sasaran Strategis Bappeda Kota Yogyakarta 2023-2026.....	21
Tabel 2.4 Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	22
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023.....	26
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023.....	27
Tabel 2.7 Target Belanja Bappeda Kota Yogyakarta Perubahan APBD Tahun 2023.....	28
Tabel 2.8 Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Tahun 2023 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	32
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	35
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	35
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	37
Tabel 3.4 Perhitungan Capaian Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2023.....	42
Tabel 3.5 Metadata Indikator Sasaran Bappeda Tahun 2023-2026.....	44
Tabel 3.6 Data Jumlah Sasaran OPD dan Program OPD.....	45
Tabel 3.7 Metadata Indikator Program Bappeda Tahun 2023-2026.....	46
Tabel 3.8 Perhitungan Skor Rata-rata Inovasi Perangkat Daerah.....	53
Tabel 3.9 Metadata Sasaran Strategis Bappeda.....	55
Tabel 3.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	56
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	57
Tabel 3.12 Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	59
Tabel 3.13 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023.....	60
Tabel 3.14 Target, Realisasi dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 – 2023.....	60
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2021-2023.....	63
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021-2023.....	65
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023.....	67
Tabel 3.18 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023.....	67
Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	74
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program Utama untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	75
Tabel 3.21 Analisis efisiensi.....	76
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2023.....	99
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Belanja diluar Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2023.....	99
Tabel 3.24 Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	103
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2023.....	104



Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah

**LKIP**  
Tahun 2023



# BAB I | Pendahuluan

# BAB 1

## Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Bappeda Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1 Struktur Organisasi

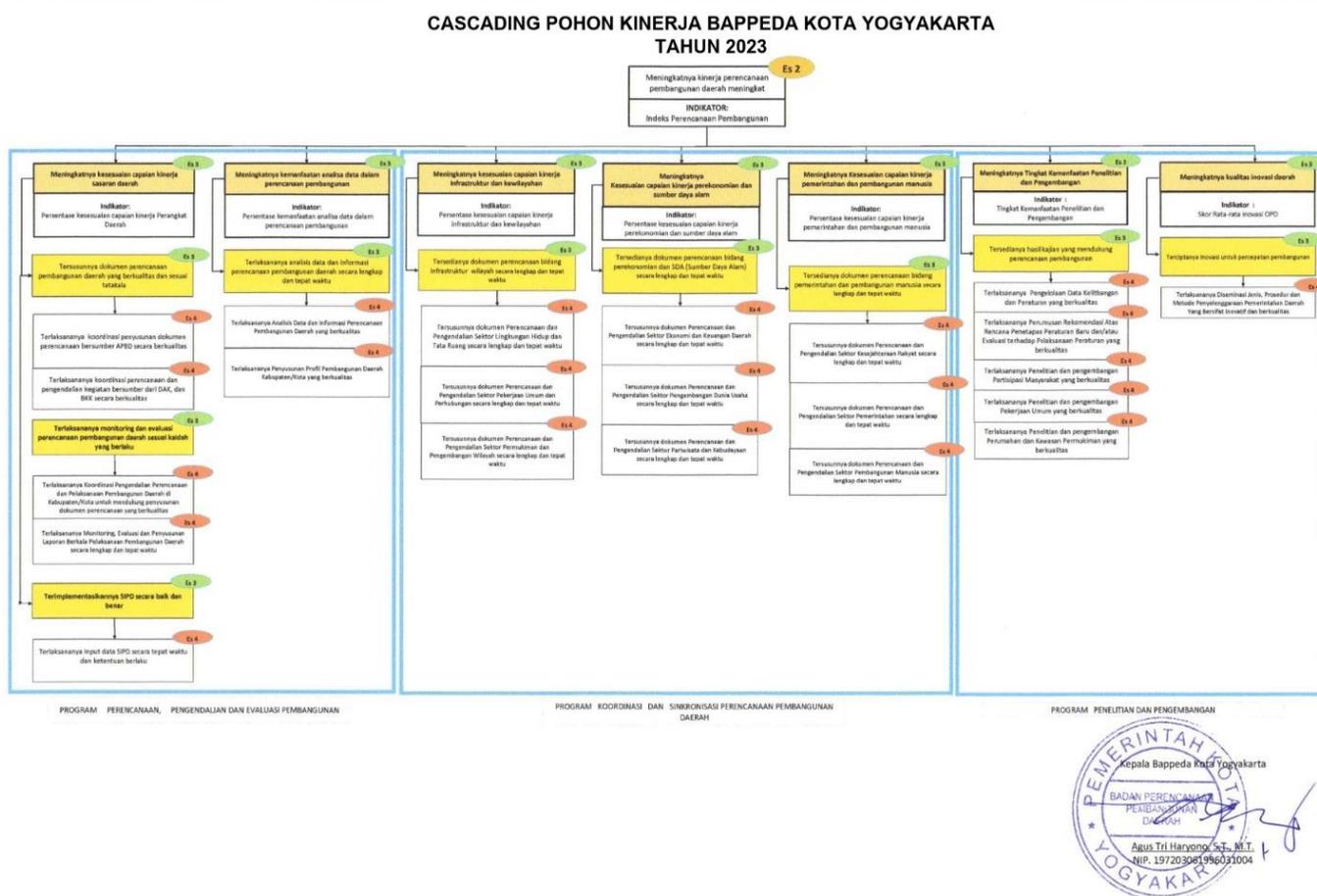
Bappeda Kota Yogyakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah dalam RPD, Bappeda mendukung untuk misi ke-3 Misi ke-3, Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa. Misi ke-5, Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya. Misi ke-6, Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean

#### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKIP*

government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum. Bappeda Kota Yogyakarta dibentuk dengan peta proses bisnis sebagai berikut .

Gambar 1.1. Pohon Kinerja Bappeda Kota Yogyakarta



Kepala Bappeda Kota Yogyakarta  
 BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN  
 DAERAH  
 YOGYAKARTA  
 Agus Tri Haryono, S.T., M.T.  
 NIP. 19720306196031004

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Bappeda Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2.2 Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penelitian Pengembangan, Riset, Inovasi dan Pengendalian Pembangunan;
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Bidang Perekonomian;
7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
8. Unit Pelaksana Teknis.
9. Setiap Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrator terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk susunan organisasi Bappeda sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1.2. Susunan Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 menetapkan bahwa Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bappeda;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

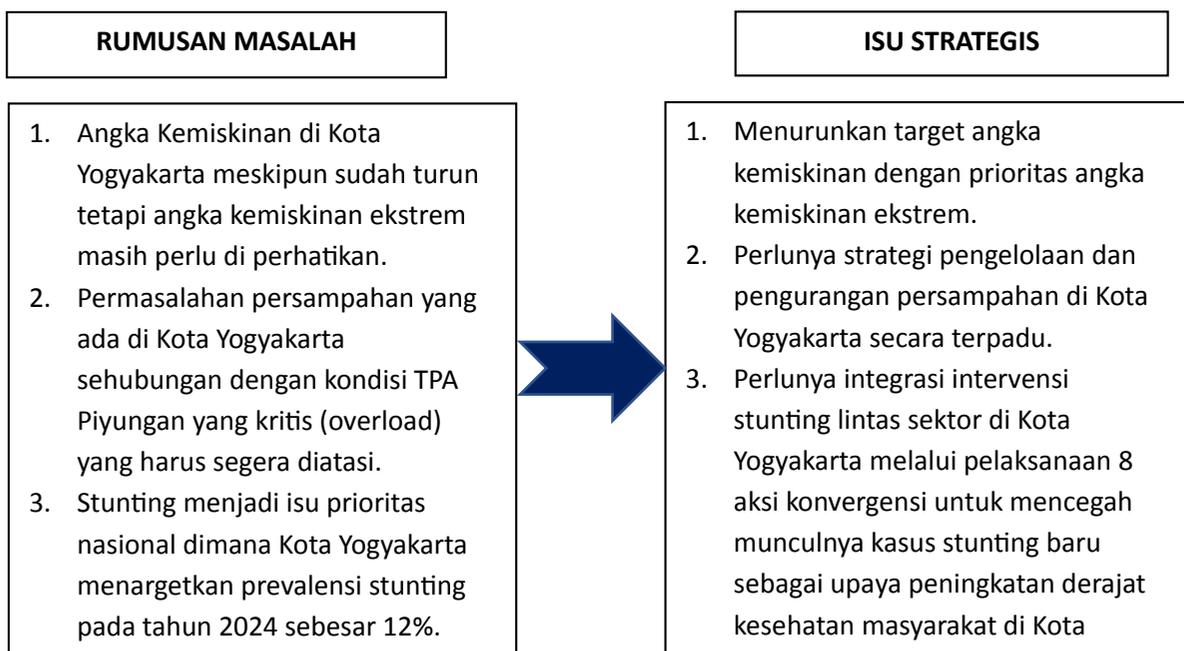
### 1.3 Isu - isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2023, isu strategis Bappeda dapat dirumuskan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1.3. Rumusan masalah dan isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta.

### 1.4 Keadaan Pegawai

Bappeda didukung oleh 56 orang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ketrampilan memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pegawai Bappeda Kota Yogyakarta per Desember Tahun 2023**

No	Nama Jabatan	Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
		Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kepala Badan</b>	S1 semua jurusan diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika Pembangunan/S2 yang serumpun	1	S2	1	1	-
2	<b>Sekretaris</b>	S1 Planologi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Teknik Sipil, S1 Hukum, S1 Geografi diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika Pembangunan/S2 yang serumpun	1	S2	1	-	1
3	<b>Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian</b>	S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Manajemen, S1 Pemerintahan, S1 Administrasi diutamakan S2 Manajemen/Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun	1	S1	1	-	1
	a) Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1	-	-	-	-
	b) Pengadministrasi Perkantoran	D-3 (Diploma-Tiga) / SLTA Sederajat	1				
	c) Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	2				
	d) Penata Layanan Operasional	SLTA sederajat / DI (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) / S-1	1	SLTA sederajat	1	1	



No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			(Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)					
4		<b>Rumpun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1	S1	1	1	
	b)	Pengadministrasi Perkantoran	D-3 (Diploma-Tiga) / SLTA Sederajat	1				
5		<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>						
	a)	<i>Perencana Ahli Muda</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	1	S1	1		1
	b)	<i>Pranata SDM Aparatur Terampil</i>	Diploma Tiga di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/ administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, teknik informatika/ manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer atau bidang ilmu yang relevan dengan bidang tugas jabatan	1				
6		<b>Kepala Sub Bag Keuangan</b>	S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Akuntansi, S1 Manajemen diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/ S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/ S2 yang serumpun	1	D3	1	1	



No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1	SLTA sederajat	1	1	
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	4	D3	2		2
7		<b>Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian</b>	S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Pertanian, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kependidikan, S1 Ilmu Budaya, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Planologi, S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi, S1 Statistika diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 yang serumpun	1	S3	1	1	
8		<b>Rumpun Penelitian dan Pengembangan</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
	b)	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	1				
9		<b>Rumpun Inovasi Daerah</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2				
10		<b>Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1	1	
11		<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>						
	a)	<i>Analisis Kebijakan Ahli Muda</i>	S1 Semua Jurusan	2	S1	2	1	1
	b)	<i>Perencana Ahli Pertama</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	2	S1	2		2



No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	c)	<i>Perencana Ahli Muda</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	1	S1	1		1
	d)	<i>Peneliti Ahli Pertama</i>	S2 sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan	2	S2	2	1	1
12		<b>Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	S1 Planologi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Teknik Sipil, S1 Geografi, S1 Hukum diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 yang serumpun	1	S1	1		1
13		<b>Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
14		<b>Rumpun Perencanaan Pendanaan keistimewaan dan Non APBD</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S2	1		1
15		<b>Rumpun Analisa Data Pembangunan</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1		1
16		<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>						
	a)	<i>Perencana Ahli Pertama</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	3	S1	2	1	1



No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
	b)	<i>Perencana Ahli Muda</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	3	S2	2	1	1
17		<b>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	S1 Sosiologi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Geografi diutamakan S2 Manajemen/S2 Sosiologi/S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan/S2 yang serumpun	1	S2	1	1	
18		<b>Rumpun Kesejahteraan Rakyat</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	3	S1	1		1
19		<b>Rumpun Pemerintahan</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	3	S1	2	1	1
20		<b>Rumpun Pembangunan Manusia</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	1		1
21		<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>						
	a)	<i>Perencana Ahli Pertama</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	2	S1	2	1	1
	b)	<i>Perencana Ahli Muda</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang	5	S1	2	1	1



No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			relevan dengan tugas jabatan					
	b)	<i>Perencana Ahli Madya</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	1				
22		<b>Kepala Bidang Perekonomian</b>	S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Statistika, S1 Geografi diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika Pembangunan/S2 yang serumpun	1	S2	1		1
23		<b>Rumpun Ekonomi dan Keuangan Daerah</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2				
24		<b>Rumpun Pengembangan Dunia Usaha</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
25		<b>Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	1				
26		<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>						
	a)	<i>Perencana Ahli Pertama</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	5	S1	5	2	3



No	Nama Jabatan	Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
		Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
	b) <i>Perencana Ahli Muda</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	3	S2	2	1	1
	c) <i>Analisis Perdagangan Ahli Pertama</i>	S-1 Hukum; D-IV Hukum; S-1 Ilmu Ekonomi; S-1 Ekonomi Pembangunan; S-1 Manajemen; S-1 Administrasi; S-1 Ekonomi Pertanian ; S-1 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis; S-1 Teknologi Pertanian; S-1 Teknik Mesin dan Biosistem; S-1 Teknik Pertanian; S-1 Sosial Ekonomi Pertanian; S-1 Teknologi Industri Pertanian; S-1 Hukum Internasional; S-1 Ilmu dan Teknologi Pangan; S-1 Ekonomi Islam; S-1 Ekonomi Syariah; S-1 Agribisnis; S-1 Ilmu Hukum; S-1 Sosial Politik Hubungan Internasional; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Desain Produk	1	S1	1		1
27	<b>Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Planologi, S1 Teknik Lingkungan S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Pertanian, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kependidikan, S1 Ilmu Budaya, diutamakan S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah/S2 Manajemen/S2 Magister Ekonomika	1	S2	1		1



No	Nama Jabatan		Kualifikasi dan Kebutuhan Pegawai Sesuai Anjab		Eksisting Pegawai			
			Kualifikasi Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	2		3	4	5	6	7	8
			Pembangunan/S2 yang serumpun					
28		<b>Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	2	S1	2		2
29		<b>Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	3	D4	2		2
30		<b>Rumpun Permukiman dan Pengembangan Wilayah</b>						
	a)	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat)	3	S1	1	1	
31		<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>						
	a)	<i>Perencana Ahli Pertama</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	2	S1	2	1	1
	b)	<i>Perencana Ahli Muda</i>	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya yang relevan dengan tugas jabatan	4	S2	4		4
		<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>		<b>56</b>	<b>20</b>	<b>36</b>



Kondisi sumber daya manusia pada Bappeda belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 90 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 56 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 34 pegawai. Pada sisi pendidikan, pendidikan terendah adalah SLTA sebanyak 2 pegawai, D3 sebanyak 3 pegawai, D-IV sebanyak 3 pegawai, S1 sebanyak 31 pegawai, S2 sebanyak 16 pegawai, dan pendidikan tertinggi adalah S3 sebanyak 1 pegawai. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia kurang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 20 orang atau 35,7% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 36 orang atau 64,3% dari jumlah total pegawai.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	47
3	II	4
4	I	-

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	6
4	IV	2
5	Jabatan Fungsional	30
6	Jabatan Pelaksana	17

Sesuai dengan hasil Analisa Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi Bappeda yang ideal didukung oleh 90 orang pegawai dengan rincian Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebanyak 9 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 37 orang, dan Jabatan Pelaksana sebanyak 44 orang. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2023 Bappeda Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, Bappeda berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Ahli maupun Penyedia Jasa



No	Nama Barang	Jumlah (unit)
2	Kendaraan roda 2	22
3	Alat Ukur	1
4	Alat Kantor	87
5	Alat Rumah Tangga	565
6	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29
7	Alat Studio	5
8	Alat Komunikasi	7
9	Unit Alat Laboratorium	1
10	Komputer Unit	47
11	Peralatan Komputer	49
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7
13	Bahan Perpustakaan Tercetak	36
14	Alat Bercorak Kebudayaan	9
15	Tanda Penghargaan	2
16	Aset Tidak Berwujud	126

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Bappeda mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 22 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 4 unit, dan dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 56 orang pegawai dan 19 Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJLOP), akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang.

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada anggaran murni tahun 2023 Bappeda Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.118.065.604,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 13.952.865.604,- yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 8.846.837.350; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.806.028.254; Belanja Hibah sebesar Rp. 300.000.000; dan Belanja Modal Rp 165.200.000,- . Pada perubahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 14.642.918.434,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 14.262.050.534,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.116.683.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.845.367.534,- belanja hibah sebesar Rp. 300.000.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 380.867.900,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-



program pendukung. Belanja yang berasal dari APBD untuk mendukung 4 (empat) program, 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan.

### **1.7 Sistematika LKIP**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## **BAB IV PENUTUP**



Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah

**LKIP**  
Tahun 2023



# BAB II

# Perencanaan Kinerja

# BAB 2

## Perencanaan Kinerja

### 2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022.

Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022).

Renstra Bappeda tahun 2023-2026 yang semula hanya ada satu sasaran strategis perangkat daerah, maka pada periode tahun 2023-2026 sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta seluruh perangkat daerah harus memasukkan satu sasaran strategis yaitu meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran yaitu kategori hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

#### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2023*

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Target Tahunan**  
**Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5 Skala 0-100	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kategori Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

Sumber Data : Kepwal Perbaikan Kinerja 2023-2026

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026**

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Visi: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, Yang Berwawasan Lingkungan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah
2	Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan
3	Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta	Menurunnya Ketimpangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi



	yang Unggul dalam Pelayanan Jasa	Pendapatan Antar Penduduk	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin
4	Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5	Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat
6	Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7	Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas
				Jumlah Pelanggaran Perda
8	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah
9	Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup

Sumber: RPD Kota Yogyakarta 2023-2026

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bappeda Kota Yogyakarta mendukung misi yang keenam dengan sasaran daerah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator capaian sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.



Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan operasional Bappeda tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Bappeda Kota Yogyakarta selama 4 tahun anggaran adalah : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.

### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis Bappeda Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5 Skala 0-100	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kategori Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

Sumber Data : Kepwal Perbaikan Kinerja 2023-2026

Adapun formula dari Indikator Sasaran Perangkat Daerah untuk Indeks Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

- ( 60% capaian sasaran Pemkot + 20% sasaran Perangkat Daerah + 20% capaian program perangkat daerah ) dikali 100.

#### 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 terdiri dari 4 program. Adapun Ke empat program tersebut adalah sebagai berikut : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Program penelitian dan pengembangan daerah serta Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Tabel 2.4**  
**Strategi, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol>
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan</li> </ol>



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		<b>Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 3. Pelaksanaan konsultasi Publik 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> </ol>
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> <li>2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> <li>3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD,RPJMD dan RKPD)</li> </ol>
		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Data Kelitbitan dan Peraturan</li> <li>2. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan</li> </ol>
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</li> </ol>
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</li> <li>2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ol>
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</li> </ol>

## 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan



program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

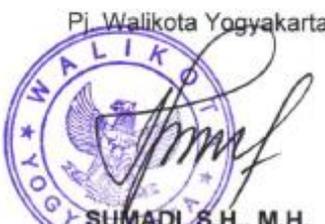
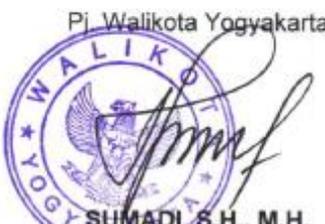
Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022, Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5 Skala 0-100
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90,67

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 792.398.795,-	APBD TA. 2023
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.943.065.706,-	APBD TA. 2023
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.1.204.068.352,-	APBD TA. 2023
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.10.178.532.751,-	APBD TA. 2023
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 14.118.065.604,-</b>	

Yogyakarta, 09 JAN 2023

  
 Pj. Walikota Yogyakarta  
  
**SUMADI S.H., M.H.**  
 NIP. 196308261989031007

  
 Kepala Badan Perencanaan  
 Pembangunan Daerah  
  
**AGUS TRI HARYONO, ST.,MT**  
 NIP. 197203061996031004

Pada bulan November Tahun 2023, Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sehingga perlu menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5 Skala 0-100
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

No	Program	Perubahan Anggaran 2023	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 780.798.795,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.872.883.706,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.344.008.352,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.645.227.581,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp. 14.642.918.434,-</b>	

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Pj. Wali Kota Yogyakarta  
  
**SINGGIH RAHARJO, SH.,M.Ed**

Kepala Badan Rencanan  
 Pembangunan Daerah  
  
**AGUS TRI HARYONO, ST.,MT**  
**NIP. 197203061996031004**

Indikator Kinerja tetap tetapi Target Kinerja untuk Meningkatkan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang semula targetnya berupa angka tetapi sesuai Kepwal tersebut berubah menjadi huruf (nilai). Sedangkan dari sisi penganggaran untuk volume dan anggaran bertambah sebesar Rp 524.852.830,- atau naik sebesar 3,6 % dari total anggaran sehubungan dengan adanya penambahan untuk pelaksanaan anugerah inovasi penelitian, kajian branding tagname YK, Kajian BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan Bappeda planning gallery dan tambahan gaji dan TPP untuk rencana penambahan pegawai PPPK.



### 2.3 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada tahun 2023 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 14.118.065.604,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 13.952.865.604,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 165.200.000,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2023 anggaran belanja menjadi Rp 14.642.918.434,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 14.262.050.534,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 380.867.900,-.

**Tabel 2.7**

**Target Belanja Bappeda Kota Yogyakarta Perubahan APBD Tahun 2023**

Uraian	Target	Prosentase
<b>Belanja Operasi</b>	Rp 14.262.050.534,-	97,4%
<b>Belanja Modal</b>	Rp 380.867.900,-	2,6%
<b>Jumlah</b>	Rp 14.642.918.434,-	100 %

Untuk tahun 2023, perubahan anggaran Bappeda sebesar Rp. 14.642.918.434,- diperuntukkan untuk mendukung 4 program 18 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung /kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama/kegiatan utama terdiri dari 3 program yaitu program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, serta program penelitian dan pengembangan daerah dengan 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan ada pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Tahun 2023 per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.645.227.581</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60.213.850</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.168.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.921.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.478.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.488.810
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.488.860
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.632.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.037.180
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.133.364.000</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.116.683.000
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.675.000
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	989.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	483.000
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	715.000
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.830.000
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	989.000
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.668.000</b>
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	567.000
16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	567.000
17	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	989.000
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	989.000
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	989.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	567.000
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>66.749.000</b>
21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	66.749.000
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>458.217.370</b>
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.190.000
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.984.620
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.036.550
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.312.200
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.964.000
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.730.000
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>381.617.900</b>
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.617.900
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.500.000</b>
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000
30	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.000.000
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>434.897.461</b>
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.062.000
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.460.000
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.100.000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	240.275.461
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>780.798.795</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>362.133.023</b>
36	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	194.257.766
37	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	44.881.744
38	Pelaksanaan Konsultasi Publik	6.957.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
39	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	22.389.000
40	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	93.647.513
<b>2.2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>106.719.372</b>
41	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	101.266.372
42	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.453.000
<b>2.3</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>311.946.400</b>
43	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	136.174.116
44	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	175.772.284
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.872.883.706</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>498.987.440</b>
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.958.360
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94.697.720
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	344.331.360
<b>3.2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>418.134.750</b>
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.642.750
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	77.505.000
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	253.987.000
<b>3.3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>955.761.516</b>
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	114.198.488
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	394.107.488
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	447.455.540



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.344.008.352</b>
<b>4.1</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>120.521.818</b>
54	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	49.930.275
55	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	70.591.543
<b>4.2</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>453.103.810</b>
56	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	453.103.810
<b>4.3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>408.440.724</b>
57	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	205.062.362
58	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	203.378.362
<b>4.4</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>361.942.000</b>
59	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	361.942.000
<b>ANGGARAN TOTAL</b>		<b>14.642.918.434</b>

### 2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Perubahan anggaran Bappeda Tahun 2023, belanja yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Alokasi Anggaran Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.872.883.706,-	12,8%	Terdiri dari 3 kegiatan, 9 sub kegiatan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 780.798.795,-	5,3%	Terdiri dari 3 kegiatan, 9 sub kegiatan
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.344.008.352,-	9,2%	Terdiri dari 4 kegiatan, 6 sub kegiatan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.645.227.581,-	72,7%	Terdiri dari 8 kegiatan, 35 sub kegiatan



Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Bappeda yaitu program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 3 bidang/sektoral, program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 2 bidang, program penelitian dan pengembangan daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Riset, Inovasi Pengendalian Daerah serta program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana didalamnya termasuk anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN . Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka untuk program koordinasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah adalah program perangkat daerah untuk mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah sedangkan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah

**LKIP**  
Tahun 2023



# BAB III | Akuntabilitas Kinerja



# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Bappeda Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	<p><u>Indikator :</u> Indeks Perencanaan Pembangunan</p> <p><u>Metadata Indikator :</u> (60% capaian sasaran Pemkot + 20% sasaran perangkat daerah + 20 % capaian program perangkat daerah) dikali 100</p>	persen	92,5 Skala 0-100	98,18	106,14

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kategori Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Huruf	A	AA	109,5%

Dari tabel di atas, pencapaian target sasaran Bappeda tahun 2023 untuk indeks perencanaan pembangunan dari target 92,5 % terealisasi 98,18% dengan formula penghitungan 60% capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah .

Sedangkan untuk target sasaran Meningkatkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kategori hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, perolehan nilai sampai Triwulan III hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi General Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebesar 98,53% atau kategori AA. Meskipun penilaian hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi General baru sampai Triwulan III tetapi sesuai dengan kebijakan Tim SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta nilai tersebut sudah bisa dipergunakan untuk pelaporan LKIP Perangkat Daerah.

Adapun untuk capaian target sasaran indeks perencanaan pembangunan , untuk capaian sasaran Pemkot atau sasaran daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

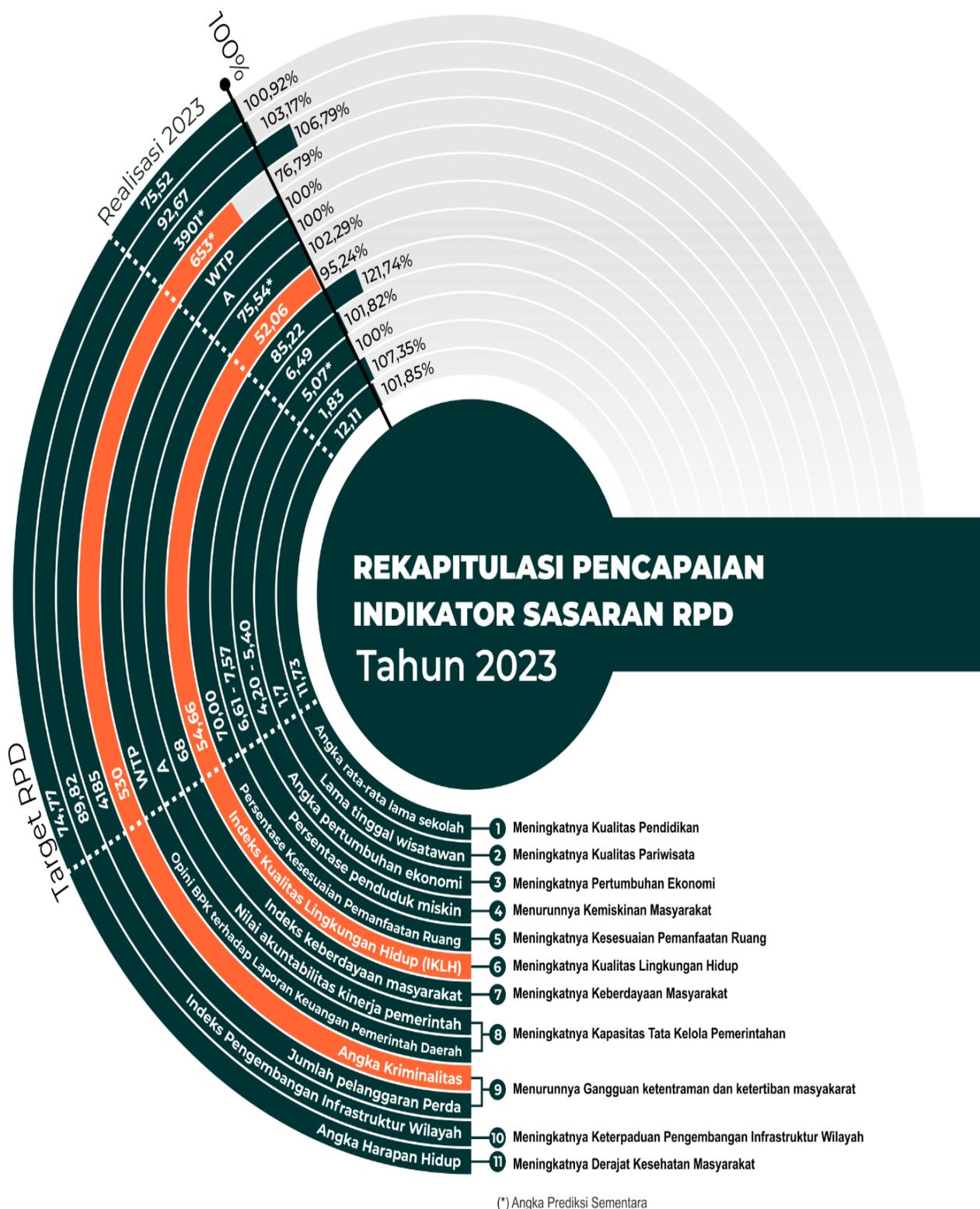


**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2023				Keterangan
				Target RPD	Target Perkin	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	11,73	11,89	12,11	101,85%	Data 2023 Rilis BPS
2	Meningkatnya kualitas pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,70	1,70	1,83	107,35%	Data per bln Nov
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,20% - 5,40%	4,20% - 5,40%	5,07*	100,00%	Angka Proyeksi Bappeda
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,61% - 7,57%	6,61% - 7,57%	6,49	101,82%	Data 2023 Rilis BPS
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	70,00	70,00	85,22	121,74%	Hasil Perhitungan Dinas Pertaru
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	nilai	54,66	54,66	52,06	95,24%	Hasil Perhitungan DLH
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	nilai	68	73,85	75,54*	102,29%	Hasil Perhitungan Bappeda
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	nilai	A	A	A	100,00%	Data Realisasi 2023 Rilis Kemenpan RB



No	Sasaran	Indikator	Satuan	2023				Keterangan
				Target RPD	Target Perkin	Realisasi	Capaian	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	100,00%	Data Realisasi 2022 Rilis BPK
9	Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	kasus	530	530	653*	76,79%	Data per bln Nov Polresta Kota Yk
		Jumlah pelanggaran Perda	kasus	4.185	4.185	3.901*	106,79%	Data per tgl 12 Des Satpol PP Kota Yk
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	nilai	89,82	89,82	92,67	103,17%	Hasil Perhitungan Bappeda
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	74,77	74,83	75,52	100,92%	Data 2023 Rilis BPS



**Gambar 3.1**  
**Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran RPD Tahun 2023**

Sumber: Bappeda, Tahun 2023

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebesar 11,73 tahun, target pada Perjanjian Kinerja sebesar 11,89 tahun, realisasi sebesar 12,11 tahun atau 101,85% (Data 2023 rilis BPS). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui target dari yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

## 2. Lama Tinggal Wisatawan

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebesar 1,70 hari, target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1,70 hari, realisasi sebesar 1,83 hari atau 107,35% (Data per bulan Nopember Tahun 2023). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui target dari yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

## 3. Pertumbuhan ekonomi

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 4,20% - 5,40% , realisasi sebesar 5,07\* atau 100% (Data angka proyeksi Bappeda). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui target dari yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

## 4. Persentase Penduduk Miskin

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 6,61% - 7,57%, realisasi sebesar 6,49 atau 101,82% (Data 2023 rilis BPS). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui target dari yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

## 5. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 70,00%, realisasi sebesar 85,22% atau 121,74% (Hasil perhitungan Dinas Petaru). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui target dari yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

## 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja dengan nilai sebesar 54,66, realisasi dengan nilai sebesar 52,06 atau 95,24% (Hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup). Capaian kinerja tidak tercapai dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

## 7. Indeks keberdayaan masyarakat

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan nilai sebesar 68 dan target pada Perjanjian Kinerja dengan nilai sebesar 73,85, realisasi dengan nilai sebesar 75,54 atau 102,29% (Hasil perhitungan Bappeda). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

## 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja dengan nilai A, realisasi mendapatkan nilai A atau 100% (Data Realisasi 2023 Rilis Kemenpan RB). Capaian kinerja tercapai dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

9. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja adalah predikat WTP, realisasi mendapatkan predikat WTP atau 100% (Data Realisasi 2022 Rilis BPK). Capaian kinerja tercapai dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

10. Angka kriminalitas

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja adalah 530 kasus, realisasi 653 kasus atau 76,79% (Data per Nopember 2023 Polresta Kota Yk). Capaian kinerja tidak tercapai dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

11. Jumlah pelanggaran Perda

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja adalah 4.185 kasus, realisasi 3.901 kasus atau 106,79% (Data per 12 Desember Satpol PP). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

12. Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan target pada Perjanjian Kinerja dengan nilai 89,82, realisasi sebesar 92,67 atau 103,17% (Hasil perhitungan Bappeda). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

13. Angka harapan hidup

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebesar 74,77 tahun dan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 74,83 tahun, realisasi sebesar 75,52 tahun atau 100,92% (Data 2023 rilis BPS). Capaian kinerja tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan baik target RPD maupun target Perkin.

**Adapun perhitungan kinerja untuk persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah** dengan indikator rata-rata capaian sasaran daerah tahun 2023 adalah sebesar 97,28% lebih tinggi dari target yang direncanakan yaitu 92,5% . Dengan demikian ada kenaikan sebesar 4,78% untuk capaian kinerja sasaran daerah. Perhitungan capaian kinerja sasaran daerah dapat dilihat pada table dibawah ini.



**Tabel 3.4**  
**Perhitungan Capaian Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2023**

Pengukuran Capaian Sasaran Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023				
				Target RPD	Target Perkin	Realisasi	Capaian	Penghitungan Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	11,73	11,89	12,11	101,85%	100,00%
2	Meningkatnya kualitas pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,70	1,70	1,87	110,00%	100,00%
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,20% - 5,40%	4,20% - 5,40%	5,07	100%	100%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,61% - 7,57%	6,61% - 7,57%	6,49	101,82%	100,00%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	70,00	70,00	85,22	121,74%	100,00%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	nilai	54,66	54,66	52,06	95,24%	95,24%
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat	nilai	68	73,85	75,54	102,29%	100,00%
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	nilai	A	A	A	100,00%	100,00%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%
9	Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	kasus	530	530	692	69,43%	69,43%
		Jumlah pelanggaran Perda	kasus	4.185	4.185	4.175	100,24%	100,00%
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	nilai	89,82	89,82	92,11	102,55%	100,00%
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	74,77	74,83	75,52	100,92%	100,00%
<b>Rata-Rata</b>								<b>97,28%</b>

Untuk perhitungan sasaran perangkat daerah adalah rata-rata capaian sasaran perangkat daerah yang ada di mitra perangkat daerah yang diampu oleh mitra kerja masing-masing bidang bidang sektoral yang ada di Bappeda yaitu Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

**Adapun perhitungan untuk capaian sasaran perangkat daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :**

1. Sektor Perekonomian (mitra Bidang Perekonomian)

Perangkat Daerah mitra bidang perekonomian terdiri dari 22 perangkat daerah dengan jumlah sasaran OPD sebanyak 52. Capaian sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dari 22 perangkat daerah yang tidak tercapai sebanyak 2 perangkat daerah yaitu Kemantren Jetis dan Kemantren Pakualaman dengan masing-masing satu sasaran perangkat daerah sehingga total sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian terdapat 2 sasaran perangkat daerah yang tidak tercapai. Adapun sasaran perangkat daerah yang tidak tercapai adalah hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Dengan demikian sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dari 52 sasaran tercapai sebanyak 50 sasaran perangkat daerah.

## **2. Sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)**

Perangkat Daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari 11 perangkat daerah dengan jumlah sasaran OPD sebanyak 23. Capaian sasaran perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dari 11 perangkat daerah yang tidak tercapai sebanyak 1 perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan satu sasaran perangkat daerah. Adapun sasaran perangkat daerah yang tidak tercapai adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian sasaran perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dari 23 sasaran tercapai sebanyak 22 sasaran perangkat daerah.

## **3. Sektor pemerintahan dan pembangunan manusia (mitra Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia)**

Perangkat Daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari 16 perangkat daerah dengan jumlah sasaran OPD sebanyak 42. Capaian sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dari 16 perangkat daerah yang tidak tercapai sebanyak 2 perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) dengan satu sasaran perangkat daerah yaitu status penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan sasaran perangkat daerah yang tidak tercapai selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan demikian sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dari 42 sasaran tercapai sebanyak 40 sasaran perangkat daerah.



**Tabel 3.5 METADATA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan

Misi 3 : Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya

Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	2023		Target Kinerja Sasaran				
						Target Sasaran PD	Realisasi	2024	2025	2026		
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Indeks Perencanaan Pembangunan dilihat dari Indeks Perencanaan Pembangunan dihitung dengan formula 60% capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah	(60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah) dikali 100	Skala 0-100	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100	<b>98,18</b>	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100		
						Sumber Data:		0,00	98,18	0,00	0,00	0,00
						Capaian sasaran pemkot			97,28			
						Capaian sasaran Perangkat daerah			99,60			
						Capaian program perangkat daerah			99,42			
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Poin	90,66 poin	<del>90,67 poin</del>	-	<del>90,68 poin</del>	<del>90,69 poin</del>	<del>90,70 poin</del>		
						Review 2023						
						Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	Nilai	AA	A	AA	A	A
						Sumber Data:						
						Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase				98,53		

Adapun perhitungan untuk capaian program perangkat daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**1. Sektor Perekonomian (mitra Bidang Perekonomian)**

Perangkat Daerah mitra bidang perekonomian terdiri dari 22 perangkat daerah dengan jumlah program OPD sebanyak 137. Capaian program perangkat daerah mitra bidang perekonomian yang tidak tercapai sebanyak 5 program perangkat daerah. Dengan demikian program perangkat daerah mitra bidang perekonomian dari 137 program tercapai sebanyak 135 program perangkat daerah.

**2. Sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)**

Perangkat Daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari 11 perangkat daerah dengan jumlah program OPD sebanyak 82. Capaian program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tidak tercapai sebanyak 9 program perangkat daerah. Dengan demikian program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dari 82 program perangkat daerah tercapai sebanyak 73 program perangkat daerah.

**3. Sektor pemerintahan dan pembangunan manusia (mitra Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia)**

Perangkat Daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari 16 perangkat daerah dengan jumlah program OPD sebanyak 136. Capaian program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tidak tercapai sebanyak 11 program perangkat daerah. Dengan demikian program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dari 136 program perangkat daerah tercapai sebanyak 125 program perangkat daerah.

Adapun data sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Data Jumlah Sasaran OPD dan Program OPD**  
**Data Sasaran dan Program Perangkat Daerah**

Row Labels	Count of Ketercapaian S	Sum of Ketercapaian S2	Count of Ketercapaian P	Sum of Ketercapaian P2
Eko	52	50	137	132
IPW	23	22	82	74
PPM	42	40	136	125
<b>Grand Total</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>355</b>	<b>331</b>

	Total Indikator Sasaran	Sasaran Tercapai	Sasaran Tidak Tercapai	Persentase Tidak Tercapai
EKO	52	50	2	3,85%
IPW	23	22	1	4,35%
PPM	42	40	2	4,76%
	Total Indikator Program	Program Tercapai	Program Tidak Tercapai	Persentase Tidak Tercapai
EKO	137	132	5	3,65%
IPW	82	74	8	9,76%
PPM	136	125	11	8,09%



**Tabel 3. 7 METADATA INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan

Misi 3 : Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya

Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	2023		Target Kinerja Program				
					Target Program PD	Realisasi	2024	2025	2026		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	$\frac{\text{(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan)}}{\text{(Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan)}} \times 100\%$	Persentase	-	100,00%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
					Sumber Data :						
						484					
						484					
	Persentase kesesuaian	Rata-rata capaian sasaran daerah	Persentase	-	92,5	97,28	92,60 %	92,70 %	92,80 %		
Sumber Data :											



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	2023		Target Kinerja Program			
					Target Program PD	Realisasi	2024	2025	2026	
	capaian kinerja sasaran daerah	Capaian sasaran daerah				97,28				
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan	Persentase	-	92,50%	<b>99,61</b>	92,60 %	92,70 %	92,80 %	
		Sumber Data :								
		Capaian sasaran perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan					99,79			
		Capaian program infrastruktur dan kewilayahan					99,42			
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase	-	<b>92,5</b>	<b>99,25</b>	92,60 %	92,70 %	92,80 %	
		Sumber Data :				99,25				
		Capaian sasaran perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					99,23			
		Capaian sasaran program perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					99,27			
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam	Persentase	-	<b>92,5</b>	<b>99,45</b>	92,60 %	92,70 %	92,80 %	
		Sumber Data :					99,45			



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	2023		Target Kinerja Program		
					Target Program PD	Realisasi	2024	2025	2026
	dan sumber daya alam	Capaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam				99,52			
		Capaian program perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam				99,38			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah		-	63,76 (sangat inovatif) skor	86,11 (sangat inovatif) skor	64,08 (sangat inovatif) skor	64,70 (sangat inovatif) skor	65,00 (sangat inovatif) skor
		Sumber Data :				86,11			
		Skor rata-rata inovasi perangkat daerah				86,11			
	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	(Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti / Jumlah penelitian yang dilakukan) x 100%	Persentase	-	91,00 %	-	92,00 %	93,00 %	94,00 %
		Sumber Data :							
		Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti				-			
		Jumlah penelitian yang dilakukan				-			
<b>Review 2023</b>					-				
Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	(25% Kajian telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian	Persentase	-	<b>91,00</b>	<b>92,31</b>	92,00 %	93,00 %	94,00 %	



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	2023		Target Kinerja Program		
					Target Program PD	Realisasi	2024	2025	2026
		terimplementasi pada program OPD) x 100%							
		Sumber Data :			0	92,31	0	0	0
		Kajian telah masuk jurnal/DSS				100			
		Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD				100			
		Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPD				100			
		Kajian terimplementasi pada program OPD				23,08			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	-	A	A	A	A	A
		Sumber Data :				A			
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				A			

- **Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran program Bappeda tahun 2023 adalah sebagai berikut :**

### **1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2023 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,5 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 98,64 % . Realisasi program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2023 naik sebesar 6,14 % dibandingkan target tahun 2023.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah , dan 2) Persentase kemanfaatan Analisa data dalam perencanaan pembangunan.

Indikator Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran Daerah dihitung dengan formulasi rata-rata capaian target sasaran daerah. Total ada 11 sasaran daerah yang menjadi komponen perhitungan ketercapaian indikator ini. Hasil perhitungan rata-rata capaian sasaran daerah tercatat sebesar 97,28% (Metadata RPD Sektor Fisik Tahun 2023), sedangkan indikator Persentase kemanfaatan Analisa data dalam perencanaan pembangunan dihitung dengan formula Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan. Jumlah kemanfaatan data sebanyak 484 sedangkan Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan sebanyak 484, sehingga hasil dari indikator tersebut adalah 100% (Metadata RPD Sektor Fisik Tahun 2023). Dari dua perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :  $97,28\% + 100\% = 127,28\% : 2 = 98,64\%$ .

Pencapaian kedua indikator tersebut diatas didukung dari : pelaksanaan desk sasaran daerah yang didampingi secara intensif oleh bidang-bidang sektoral dan pelaksanaan desk metadata sektoral .

Dengan tercapainya sasaran program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tersebut bukan berarti bahwa kinerja akan berjalan ditempat, namun untuk dijadikan pendorong untuk capaian target yang lebih baik lagi karena dinamisasi perencanaan dan regulasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan akan selalu berkembang.

### **2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan yang tersebar di 3 bidang/sektoral yang ada di Bappeda, yaitu :

#### **a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada tahun 2023 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,5 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 99,25 % . Realisasi program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tahun 2023 naik sebesar 6,75% dibandingkan target tahun 2023.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program sektor pemerintahan dan pembangunan manusia diukur menggunakan indikator persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia, dengan formulasi rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program OPD sektor pemerintahan dan pembangunan manusia. Total ada dua komponen perhitungan ketercapaian indikator ini.

Komponen pertama adalah capaian target sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia. Sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari 42 sasaran tercapai sebanyak 40 sasaran perangkat daerah. Hasil perhitungan dari ketercapaian sasaran perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 99,23%.

Komponen kedua adalah capaian program perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia dihitung dari rata-rata capaian masing-masing program mitra OPD sektor pemerintahan dan pembangunan manusia dibawah kendali 3 Kelompok Substansi di bawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yaitu Kelompok Substansi pembangunan manusia, Kelompok Substansi kesejahteraan rakyat, Kelompok Substansi pemerintahan. Program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari 136 program perangkat daerah tercapai sebanyak 125 program perangkat daerah. Dari hasil perhitungan capaian program perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia tercatat sebesar 99,27%.

Dari dua perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program pemerintahan dan pembangunan manusia adalah sebagai berikut :  $99,23\% + 99,27\% = 198,5\% : 2 = 99,25\%$ . Dengan capaian tertinggi dari capaian program perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 99,27 % diikuti capaian sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 99,23 %.

#### **b. Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA pada tahun 2023 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,5 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 99,45 %. Realisasi program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA tahun 2023 naik sebesar 6,95% dibandingkan dengan target yang direncanakan di tahun 2023.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program sektor perekonomian diukur menggunakan indikator persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam dengan formulasi rata-rata capaian sasaran Perangkat daerah dan program perangkat daerah mitra bidang perekonomian. Total ada dua komponen perhitungan ketercapaian indikator ini.

Komponen pertama adalah capaian target sasaran perangkat daerah sektor perekonomian. Sasaran perangkat daerah sektor perekonomian terdiri dari 52 sasaran tercapai sebanyak 50 sasaran perangkat daerah. Hasil perhitungan dari ketercapaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian sebesar 99,52%.

Komponen kedua adalah capaian program perangkat daerah sektor perekonomian dihitung dari rata-rata capaian masing-masing program mitra OPD sektor perekonomian dibawah kendali 3 Kelompok Substansi di bawah bidang perekonomian yaitu Kelompok Substansi Ekonomi Keuangan Daerah, Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan, Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha. Program perangkat daerah mitra bidang perekonomian terdiri dari 137 program perangkat daerah tercapai sebanyak 132 program perangkat daerah. Dari hasil perhitungan capaian program perangkat daerah sektor perekonomian tercatat sebesar 99,38%.

Dari dua perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang

perekonomian dan SDA adalah sebagai berikut :  $99,52\% + 99,38\% = 198,9\% : 2 = 99,45\%$ . Dengan capaian tertinggi dari capaian sasaran perangkat daerah sektor perekonomian sebesar 99,52 % diikuti capaian program perangkat daerah sektor perekonomian sebesar 99,38 %.

### c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada tahun 2023 dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,5 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 99,61 %. Realisasi program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun 2023 naik sebesar 7,11% dibandingkan dengan target yang direncanakan di tahun 2023.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja program sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah diukur menggunakan indikator persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan formulasi rata-rata capaian sasaran Perangkat daerah dan program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Total ada dua komponen perhitungan ketercapaian indikator ini.

Komponen pertama adalah capaian target sasaran perangkat daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Sasaran perangkat daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 23 sasaran tercapai sebanyak 22 sasaran perangkat daerah. Hasil perhitungan dari ketercapaian sasaran perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebesar 99,79%.

Komponen kedua adalah capaian program perangkat daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dihitung dari rata-rata capaian masing-masing program mitra OPD sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibawah kendali 3 Kelompok Substansi di bawah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah , Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 82 program perangkat daerah tercapai sebanyak 73 program perangkat daerah. Dari hasil perhitungan capaian program perangkat daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tercatat sebesar 99,42%.

Dari dua perhitungan indikator tersebut maka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut :  $99,79\% + 99,42\% = 199,21\% : 2 = 99,61\%$ . Dengan capaian tertinggi dari capaian sasaran perangkat daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebesar 99,79 % diikuti capaian program perangkat daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebesar 99,42 %.

## 3. Program penelitian dan pengembangan daerah

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis untuk program penelitian dan pengembangan daerah pada tahun 2023 terdiri dari 2 indikator yaitu persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta skor rata-rata inovasi perangkat daerah. Adapun indikator pertama yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 91 % , realisasi untuk capaian kinerja sebesar 92,31 %. Realisasi dari indikator tersebut naik sebesar 1,31% dibandingkan target tahun 2023.



Sedangkan untuk indikator yang ke dua yaitu skor rata-rata inovasi perangkat daerah target yang direncanakan di tahun 2023 sebesar 63,76 (sangat inovatif), realisasi untuk capaian kinerja sebesar 86,11 (sangat inovatif). Realisasi dari indikator tersebut naik sebesar 22,35 poin dibandingkan target tahun 2023.

Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan daerah diukur menggunakan indikator persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dengan cara perhitungan : (25% Kajian telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100%. Sumber data yang digunakan adalah Kajian telah masuk jurnal/DSS (100), Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD (100) ,Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPD (100), Kajian terimplementasi pada program OPD (23,08).

Sedangkan skor rata-rata inovasi perangkat daerah diukur dengan cara rata-rata inovasi di tiap OPD di rata-rata, kemudian dari rata-rata skor OPD di rata-rata lagi untuk seluruh OPD se Pemkot. Adapun perhitungan skor rata-rata inovasi perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8**  
**Perhitungan Skor Rata-rata Inovasi Perangkat Daerah**

OPD	Inovasi	Skor tiap inovasi	Akumulasi Skor Inovasi pada tiap OPD	Rata-rata Inovasi pada tiap OPD
1 Badan Kesbangpool	1 Parenting Kebangsaan bersama siKumbang (Kartu Tumbuh Kebangsaan)	90	90	90
2 bagian Adminbang	2 Early Warning Report (EWaR) dalam SIM Pelaporan	88	88	88
3 bagian Kesra	3 Dodolan Kampung	89	89	89
4 bagian Kraton	4 LAPIS KERATON ( LAYANAN PASAR KEMIS KEMANTREN KRATON )	89	89	89
5 Bagian PBJ	5 SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pengadaan)	80	80	80
6 bagian PK	6 Teman Perkasa (Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah)	83	83	83
7 Bappeda	7 Aplikasi AIP	95	357	89,25
	8 E-Jarlit	91		
	9 Smart DSS	87		
	10 SIMONEVA (Sistem Monitoring dan Evaluasi)	84		
8 BKPSDM	11 Jogja Corporate University (Jogja Corpu)	90	254	84,67
	12 E SKM	82		
	13 Sistem Aplikasi E-PKP 360° (Penilaian Kinerja Pegawai 360°) Pemerintah Kota Yogyakarta	82		
9 BPKAD	14 WASPADA	88	88	88
10 Dinas Dikpora	15 e-SEMBADA Sistem Pembelajaran Hibrida	83	83	83
11 Dinas Dukcapil	16 JOGJA KONSOLIDASI DATA (JOGJA SOLID)	90	256	85,33
	17 MANTAP (Manten ANyar Tercatat dApat emPat)	85		
	18 MANTUL TENAN (Manten Anyar Entuk Telu Tuntas Dalam Sekali Layanan)	81		
12 Dinas Kesehatan	19 E-Regulasi (Izin Praktik Tenaga Kesehatan)	84	168	84
	20 Dilan E-IRTP (Digitalisasi layanan elektronik industri rumah tangga pangan )	84		
13 Dinas Kominfo	21 JOGJA SMART SERVICE (JSS)	107	282	94
	22 KUAT EKSIS DI WILAYAH (Penguatan Ekosistem Digital Berbasis Kewilayahan)	88		
	23 YKTV	87		

14	Dinas Pariwisata	24	Monalisa : Menikmati Harmoni Kota Jogja dengan Lima Jalur Sepeda Wisata	85	85	85
15	Dinas Perdagangan	25	SIMPATIK PASAR (Sistem Pelayanan Praktis Pedagang Pasar)	86	86	86
16	Dinas Pertaru	26	LONTAR (Layanan Online Pertanahan dan Tata Ruang Jogja)	85	85	85
17	DLH	27	Uji Kualitas Air dengan LIMS (Laboratory Information Management System)	87	169	84,5
		28	Laron Sarungan (Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan)	82		
18	DP3AP2KB	29	Dapur Balita Sehat	81	81	81
19	DPK	30	SAPARATU ( SARANA PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN KOLEKSI PUSTAKA TANPA TURUN DARI KENDARAAN )	94	261	87
		31	STARLA (STORY TELLING ANAK ONLINE PERPUSTAKAAN KOTA YOGYAKARTA)	85		
		32	PANDORA (PENDAFTARAN ANGGOTA ONLINE PERPUSTAKAAN KOTA YOGYAKARTA)	82		
20	DPMPTSP	33	SIM DOK IMB (Sistem Informasi Manajemen Dokumen IMB)	85	85	85
21	Kem Danurejan	34	Penguat Tangan Menjadi Pangan	80	80	80
22	kem Jetis	35	PELAYANAN UMUM MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (PUMMA)	88	171	85,5
		36	LOSIDA (Lodong Sisa Dapur)	83		
23	kem Kotagede	37	TEKO MAS KAGE (SisTEm quickResponse cOde MASyarakat KotAGEde)	81	81	81
24	Kem Mergangsan	38	MISS JUM PaDos DUIT WuTah ( Kamis Jum'at Parasdyo Dadosa Doa Usaha Ilmu dan Teman)	102	102	102
25	Kem Mj	39	MANTRA 'SARILAYA' (MAKAM AMAN DAN TERTATA RAPI)	94	182	91
		40	VCMJ (VIRTUAL CATALOGUE MANTRIJERON)	88		
26	Kem PA	41	PENGEMBANGAN INOVASI WARSIMAH (WARUNG EDUKASI OMAH KREATIF LOEDJI 16) MENJADI LABORATORIUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, WARUNG PEMBERDAYAAN DAN SIDOLAH (SINAU SENAMBI DOLAN KARO WARSIMAH)	81	81	81
27	kem Tegalrejo	42	pasajo.com (Pasar Online Tegalrejo)	83	83	83
28	Kem Wirobrajan	43	ONE STOP KAVLING MAKAM	95	345	86,25
		44	SEDIA BUBUR LIMA (SEKOLAH DIGITAL BIBIT UNGGUL BUGISAN RW LIMA)	86		
		45	KOLAK DUREN : PENINGKATAN PENGELOLAAN PELAPORAN DATA KINERJA DAN DATA KEUANGAN KEMANTREN WIROBRAJAN	84		
		46	NAMA SI MANTAN (PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMANTREN WIROBRAJAN)	80		
29	RS Pratama	47	SI SEDAP (Sajian bergizi Sehat dan Sedap) Sajian Menu Pilihan Pasien dan Integrasi Menu dalam SIM-RS	82	82	82
30	RSUD Yk	48	EMR on SMARTA (Electronic Medical Record on Sistem Informasi Manajemen RSUD Kota Yogyakarta)	91	91	91
31	Satpol PP	49	Pantib For School	86	86	86
Akumulasi rata-rata inovasi OPD						2669,5
Skor rata-rata inovasi seluruh OPD						86,1129



Tabel 3.9 Metadata Sasaran Strategis Bappeda

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Target Perbaikan Kinerja/Perkin/Review 2023	Realisasi Sasaran 2023	Capaian Sasaran 2023	Hitungan Capaian Bappeda Sasaran	Ketercapaian Sasaran	Predikat Permendagri	Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Target Perbaikan Kinerja/Perkin/Review 2023	Realisasi Program 2023	Capaian Program 2023	Hitungan Capaian Bappeda Program	Ketercapaian Program	Predikat Permendagri				
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Indeks Perencanaan Pembangunan dilihat dari Indeks Perencanaan Pembangunan dihitung dengan formula 60% capaian sasaran pemkot + 20% capaian program perangkat daerah	(60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah) dikali 100	92,5	98,18	106,14%	100,00%	1	Sangat Tinggi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100%	100%	100%	100,00%	100,00%	1	Sangat Tinggi				
																				Sumber Data:	98,18	Sumber Data:	100%
																				Capaian sasaran pemkot	97,28	Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	484
																				Capaian sasaran Perangkat daerah	99,60	Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan	484
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Penilaian RB berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	AA	109,53%	100,00%	1	Sangat Tinggi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Rata-rata capaian sasaran daerah	92,50%	97,28%	105,17%	100,00%	1	Sangat Tinggi				
																				Sumber Data:	98,58	Sumber Data:	97,28%
																				Capaian sasaran daerah	97,28	Capaian sasaran daerah	97,28
																				Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase	98,58	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan
											PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia	92,50%	99,25%	107,30%	100,00%	1	Sangat Tinggi				
																				Sumber Data:	99,58	Sumber Data:	99,58
																				Capaian sasaran perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	99,79	Capaian sasaran perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	99,37
																				Capaian program infrastruktur dan kewilayahan	99,37	Capaian program infrastruktur dan kewilayahan	99,37
											PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam	92,50%	99,45%	107,51%	100,00%	1	Sangat Tinggi				
																				Sumber Data:	99,45	Sumber Data:	99,45
																				Capaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	99,52	Capaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	99,38
																				Capaian program perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	99,38	Capaian program perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	99,38
											PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	63,76	86,11	135,05%	100,00%	1	Sangat Tinggi				
																				Sumber Data:	86,11	Sumber Data:	86,11
																				Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	86,11	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	86,11
																				Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	86,11	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	86,11
											PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	(25% Kajian telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100%	91,00%	92,31%	101,44%	100,00%	1	Sangat Tinggi				
																				Sumber Data:	92,31	Sumber Data:	92,31
																				Kajian telah masuk jurnal/DSS	100	Kajian telah masuk jurnal/DSS	100
																				Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD	100	Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD	100
											PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	A	100,00%	100,00%	1	Sangat Tinggi				
																				Sumber Data:	A	Sumber Data:	A
																				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
																				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A



Kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Yogyakarta dengan indikator indeks perencanaan pembangunan diukur menggunakan 60% capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah. Capaian sasaran secara teknis kendalinya terdistribusi di dalam 4 bidang yaitu di bawah bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil perhitungan rata-rata capaian sasaran strategis Bappeda Kota Yogyakarta untuk indeks perencanaan pembangunan sebesar 98,18%, diperoleh dari penjumlahan :

1. capaian sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari 11 sasaran didapat nilai rata-rata 97,28% ( $60\% \times 97,28\% = 58,37\%$ )
2. capaian sasaran Perangkat Daerah yang terdiri dari 117 sasaran didapat nilai rata-rata 99,60% ( $20\% \times 99,60\% = 19,92\%$ )
3. capaian program perangkat daerah yang terdiri dari 355 capaian program didapat nilai rata-rata 99,42% ( $20\% \times 99,42\% = 19,89\%$ )

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,50 % bahkan melebihi target yaitu sebesar 98,18%. Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi.

#### A.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

##### A.1.1 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Yogyakarta dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan. Sedangkan pengukuran untuk sasaran Meningkatkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan kategori hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator untuk indeks perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	$60\% \text{ capaian sasaran pemkot} + 20\% \text{ sasaran perangkat daerah} + 20\% \text{ capaian program perangkat daerah}$
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-

Realisasi untuk meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023		
						Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	98,84%	98,73%	98,60 %	95,33%	92,5%	98,18%	106,14%
2	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	A	AA	109,53%

Realisasi tahun 2023 untuk indeks perencanaan pembangunan sebesar 98,18% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 92,5%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 106,14% . Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2023 naik sebesar 2,85%. Ketika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi kinerja Bappeda untuk indeks perencanaan pembangunan menurun sebesar 0,42%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi kinerja Bappeda menurun sebesar 0,55%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi kinerja Bappeda menurun sebesar 0,66. Hal ini disebabkan karena adanya dua sasaran daerah yang tidak tercapai yaitu Menurunnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan target sebesar 54,66 realisasi 52,06 dan Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator angka kriminalitas dengan target sebesar 530 kasus realisasi 692 atau hanya terealisasi sebesar 69,43%.

Pada tahun 2020-2021 adalah puncaknya pandemic Covid-19 sehingga banyak masyarakat mengurangi kegiatan baik perjalanan dengan kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Pada tahun 2022 ini nilai IKLH membaik sampai di angka 60,89. Aktivitas masyarakat yang sudah mulai normal sehingga pencemaran badan air terus meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2023 nilai IKLH cenderung menurun di angka 52,06.

Faktor dinamika dan Pergeseran Interaksi Sosial dari arus migrasi ke Wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian dan destinasi wisata serta salah satu pusat pendidikan di Indonesia menyebabkan pelanggaran/kasus penipuan, pencurian dan curanmor cukup besar. Kasus kriminalitas yang menonjol pada tahun 2023 di Kota Yogyakarta antaranya kasus narkoba sebanyak 159 kasus, kasus penipuan/penggelapan sebanyak 129 kasus, kasus pencurian sebanyak 77 kasus, kasus penganiayaan sebanyak 69 kasus, serta kasus pengeroyokan sebanyak 53 kasus.

Disamping itu juga ada 5 sasaran perangkat daerah dan 25 capaian program perangkat daerah di mana capaian kerjanya tidak tercapai sesuai dengan target. Sehingga hal tersebut juga

mempengaruhi capaian kinerja Bappeda secara keseluruhan mengingat formula indikator kinerja Bappeda tergantung dengan mitra perangkat daerah.

#### **A.1.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Dokumen RENSTRA Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 - 2026 telah menetapkan target kinerja selama 4 tahun, sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.11. Pada dokumen RENSTRA, target jangka menengah tahun 2023 untuk indeks perencanaan pembangunan sebesar sebesar 92,5% dan untuk hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat ditargetkan A nilai. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tersebut, realisasi tahun 2023 untuk indeks perencanaan pembangunan telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 98,18%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 106,14% . Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2023 naik sebesar 2,85%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi kinerja Bappeda masih lebih rendah atau menurun sebesar 0,42%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi kinerja Bappeda menurun sebesar 0,55%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi kinerja Bappeda menurun sebesar 0,70%. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.9, capaian kinerja Bappeda menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 ada kenaikan untuk capaian targetnya. Meskipun capaian kinerja trennya turun dari tahun-tahun sebelumnya tetapi realisasi dari target yang ditetapkan tetap terpenuhi.

Hal ini disebabkan karena adanya dua sasaran daerah yang tidak tercapai yaitu Menurunnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan target sebesar 54,66 realisasi 52,06 dan Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator angka kriminalitas dengan target sebesar 530 kasus realisasi 692 atau hanya terealisasi sebesar 69,43%. Disamping itu juga ada 5 sasaran perangkat daerah dan 25 capaian program perangkat daerah dimana capaian kinerjanya tidak tercapai sesuai dengan target.

Sedangkan untuk hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat, pada tahun 2023 ditargetkan A nilai, realisasi pada tahun 2023 sebesar AA atau pencapaian kinerja sebesar 109,53%. Indikator sasaran strategis ini untuk tahun 2023 merupakan awal permulaan untuk tambahan sasaran strategis Bappeda yaitu meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimana sasaran strategis ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang harus diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah sehingga belum bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya meskipun di tahun 2021 dan tahun 2022 pelaksanaan RB ini sudah ada penilaiannya tetapi belum menjadi sasaran strategis perangkat daerah.

Berikut rangkuman persentase realisasi tiap tahun terhadap target kinerja masing-masing tahun selama tahun 2019-2023:



**Tabel 3.12**  
**Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2023**

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	Target	91,4%	92,0%	92,2%	92,4%	92,5%
2	Realisasi	98,84%	98,73%	98,60 %	95,33%	98,18%
3	Persentase capaian	108,14%	107,32%	106,94%	103,17%	106,14%
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1	Target	-	-	-	-	A
2	Realisasi	-	-	-	-	AA
3	Persentase capaian	-	-	-	-	109,53%

**A.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas**

Capaian kinerja Bappeda apabila dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan untuk capaiannya karena tidak ada standar nasional untuk indeks perencanaan dan juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara karena masing-masing Bappeda baik di Kota/Kabupaten maupun Propinsi dalam menentukan rumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Sebagai alternatif perbandingannya adalah membandingkan sasaran daerah (Pemerintah Kota) yang merupakan salah satu komponen dari 3 komponen untuk menghitung capaian kinerja Bappeda . Indikator yang bisa diperbandingkan adalah :

**1. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

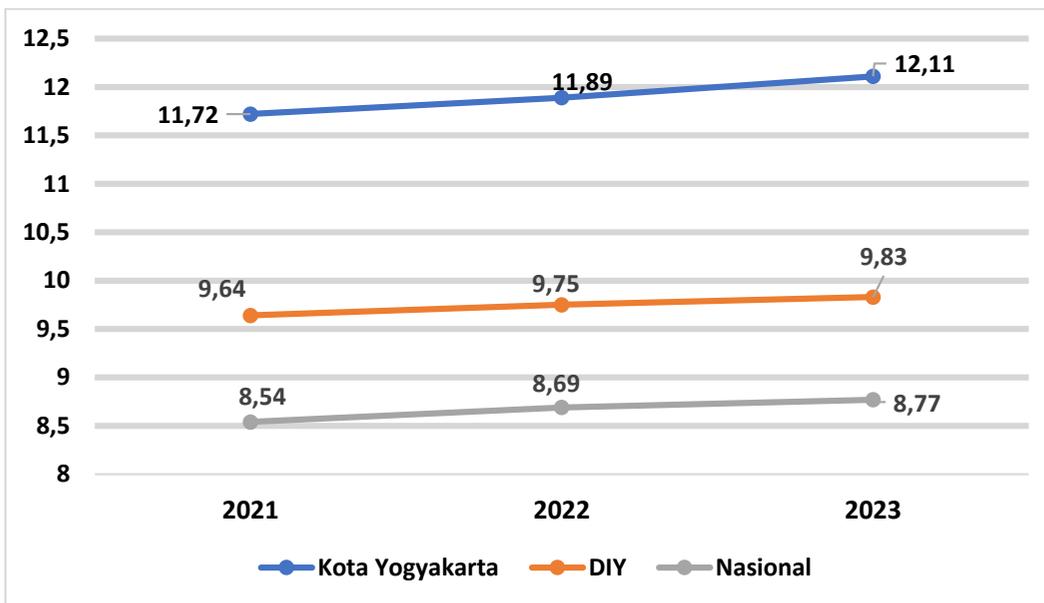
Realisasi angka rata – rata lama sekolah tahun 2021 – 2023 selalu melampaui target yang ditetapkan, baik berdasarkan target RPJMD maupun target review renstra/perbaikan kinerja. Meskipun demikian, untuk mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang merupakan visi jangka panjang maka upaya peningkatan rata–rata lama sekolah penduduk Kota Yogyakarta tetap perlu dilakukan.



**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023**

	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	11,72	11,89	12,11
DIY	9,64	9,75	9,83
Nasional	8,54	8,69	8,77

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023



**Gambar 3.2 Perbandingan RLS Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023**

Sumber: BPS (2023, diolah)

Dalam kurun waktu 2021 – 2023 RLS Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya seperti tersaji dalam tabel dan gambar di atas. RLS Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional. Pada tahun 2023 RLS Kota Yogyakarta lebih tinggi 2,28 tahun dari DIY dan lebih tinggi 3,34 tahun jika dibandingkan dengan nasional.

## 2. Angka Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

**Tabel 3.14**  
**Target, Realisasi dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 – 2023**

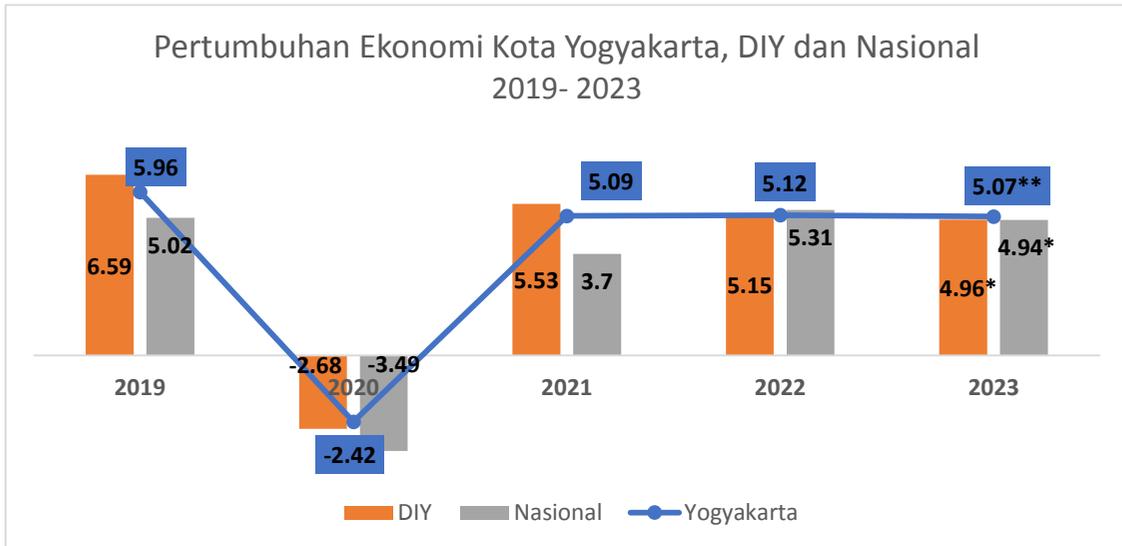
	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	5,21%	5,23%	4,20 – 5,40%
Target Perjanjian Kinerja	4,04 – 4,21%	4,20 – 5,50%	4,20 – 5,40%



Realisasi	5,09%	5,12%	5,07%*
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Bappeda dan BPS (2023, diolah)

\*) Angka Proyeksi Bappeda



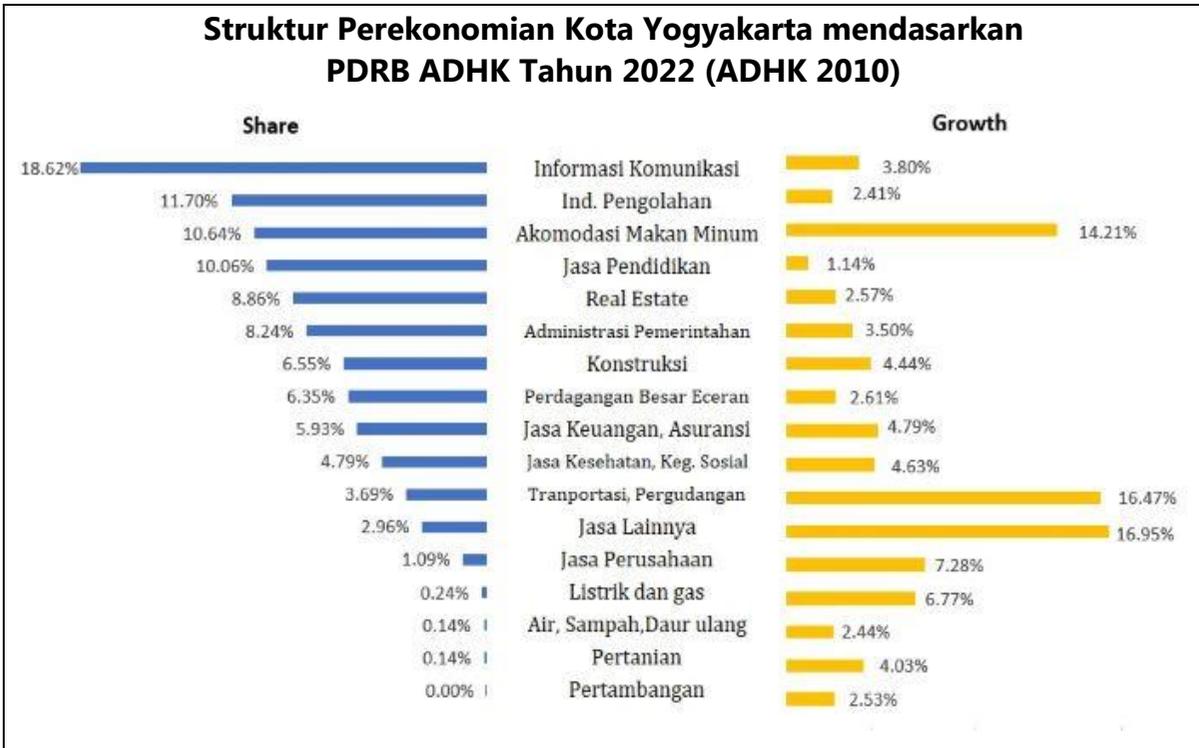
**Gambar 1.3 Grafik Target, Realisasi, dan Perbandingan Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2023**

Sumber: Data BPS, Rilis BI, diolah

\*) Hasil forecast Bank Indonesia

\*\*\*) Hasil forecast Bappeda Kota Yogyakarta

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sempat mengalami kontraksi sebesar -2,42 persen pada Tahun 2020 sebagai dampak pandemic covid-19. Pada tahun 2021 perekonomian Kota Yogyakarta mengalami *bounce back* dan tumbuh sebesar 5,16 persen. Tahun 2022 perekonomian secara umum menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan Kota Yogyakarta tumbuh pada angka 5,12 persen. Mendasarkan pada data series pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tersebut dan rilis pertumbuhan ekonomi DIY sampai dengan triwulan III, maka pada akhir tahun 2023, ekonomi Kota Yogyakarta tumbuh sebesar 5,07 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil rilis Bank Indonesia terhadap perekonomian DIY yang diprediksi tumbuh sebesar 4,96 persen dan nasional yang diprediksi tumbuh sebesar 4,94 persen.



**Gambar 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2022**

Sumber: Data BPS, Rilis BI, diolah, 2022

Struktur perekonomian Kota Yogyakarta mengalami perubahan pre dan pasca pandemi covid-19. Sebelum tahun 2020 penyediaan akomodasi dan makan minum mendominasi pergerakan perekonomian Kota Yogyakarta. Pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020 dan 2021 sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan persentase pada distribusi PDRB. Dominasi sektor informasi dan komunikasi dalam distribusi PDRB berlanjut pada struktur ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2022 dengan persentase distribusi sebesar 18,62 persen. Sektor Industri pengolahan menjadi sektor dengan persentase distribusi terbesar kedua dengan share 11,7% sementara sektor penyediaan akomodasi makan minum berada di posisi ke-3 namun mempunyai pertumbuhan sebesar 14,21 persen.

### 3. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator sasaran RPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yaitu menurunnya kemiskinan masyarakat. Sasaran ini menggunakan tolok ukur angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan BPS ini dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yaitu dengan memandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan ini dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan ini kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi 2 kelompok yaitu tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan dan tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga



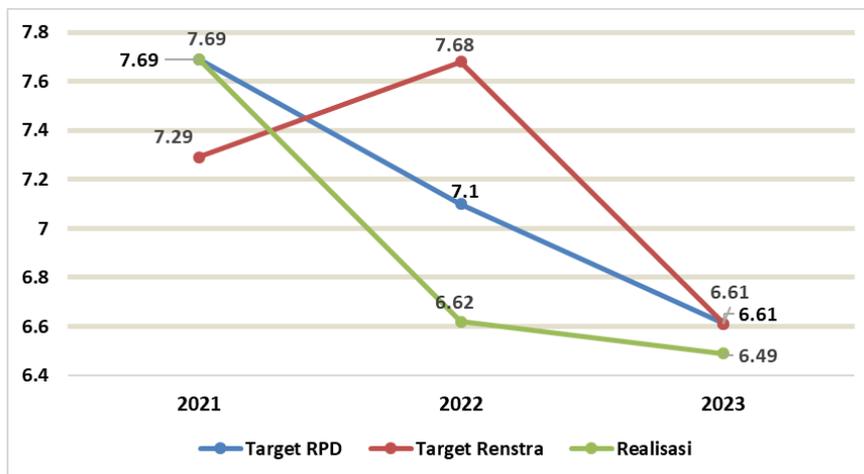
dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan diestimasi proporsinya dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei sehingga munculah angka/ tingkat kemiskinan.

**Tabel 3.15**

**Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2021-2023**

	2021	2022	2023
Target RPJMD/RPD	7,29%	7,1%	6,61 - 7,57%
Target Perjanjian Kinerja	7,29 – 7,18%	7,68 – 6,32%	6,61- 7,57%
Realisasi	7,69%	6,62%	6,49%
Capaian	<b>94,61%</b>	<b>113,80%</b>	<b>101,81%</b>

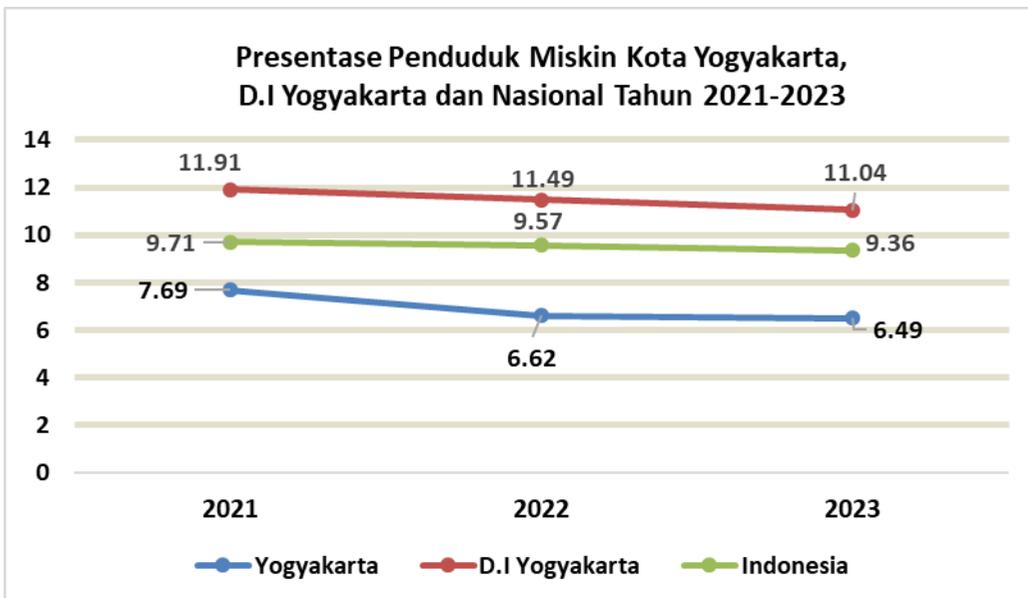
Sumber: Data Diolah, 2023



**Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi Menurunnya Kemiskinan Masyarakat**

Sumber: Data Diolah, 2023

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 6,49. Angka ini menunjukkan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 6,49 % penduduk miskin dari keseluruhan populasi penduduk. Angka kemiskinan ini terus menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 7,69 dan tahun 2022 sebesar 6,62. Sedangkan apabila dibandingkan dengan DIY dan Nasional posisi Kota Yogyakarta seperti tergambar dibawah ini:



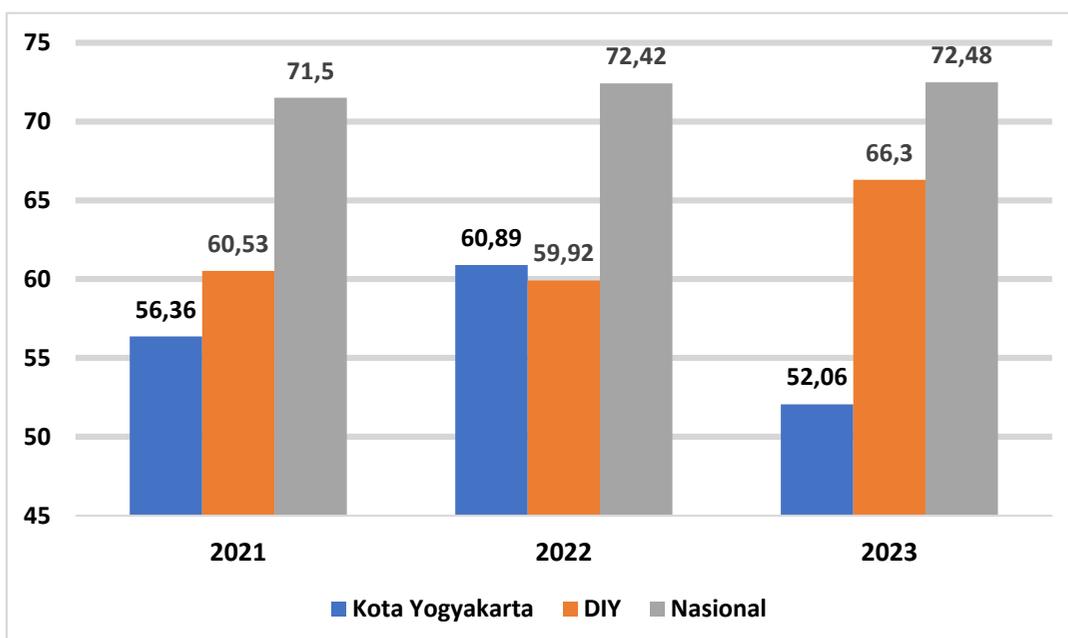
**Gambar 3. 4 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023**

Sumber: Data Diolah, 2023

Selama kurun waktu 2021-2023 persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta lebih rendah jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional. Di tingkat DIY, persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain.

#### 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Aktivitas masyarakat yang sudah mulai normal menyebabkan pencemaran badan air terus meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2023 nilai IKLH cenderung menurun di angka 52,06.



**Gambar 3.6 Perbandingan Nilai IKLH Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional 2021-2023**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (diolah)

Sesuai dengan grafik perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 di atas bahwa IKLH Kota Yogyakarta pada 2021-2023 masih berada



di bawah capaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Pada 2022 tercatat sebesar 72,4 poin atau meningkat 0,9 poin dari 71,5 poin pada 2021. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di DIY pada 2022 tercatat sebesar 59,92 poin atau menurun dari 60,53 poin pada 2021. Capaian IKLH Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 yang telah mendapatkan nilai IKLH di angka 66,30 dan masih rendah secara Nasional Tahun 2023 di angka 72,48.

Hal ini disebabkan beberapa faktor dari nilai IKA, IKU dan IKL. Indeks Kualitas Air cenderung menurun dikarenakan masih terdapat sampah dan limbah yang mengalir di sungai yang sulit untuk dihilangkan. Dari 8 parameter uji kualitas air yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada menurunnya nilai IKA. Fecal Coliform dan Total Fosfat yang tinggi menjadi masalah di Kota Yogyakarta walaupun COD, BOD dan TSS cenderung baik (memenuhi baku mutu). Fecal Coliform adalah kelompok bakteri yang biasanya ditemukan dalam usus hewan endotermik (berdarah panas), termasuk manusia, dan dapat dijumpai dalam tinja. Total Fosfat adalah ukuran konsentrasi total fosfat dalam air, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti limbah domestik, pertanian, industri, dan deterjen. Tingginya Fecal Coliform dan Total Fosfat di Kota Yogyakarta kemungkinan dapat disebabkan oleh: 1) Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta 2) Banyak pipa buangan liar yang mencemari badan air (sungai) 3) Sulitnya pengaturan pada buangan limbah home industri (contohnya laundry dan cuci mobil).

### 5. Kapasitas Tata Kelola Pemerintah

Kapasitas Tata Kelola Pemerintah diukur dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan baik target RPD dan target RKPD. Artinya sasaran daerah ke delapan telah tercapai 100% pada 2023 dengan predikat sangat baik. Kemudian perbandingan realisasi indikator sasaran terhadap realisasi pada tingkat provinsi dan pusat terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.16**  
**Perbandingan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021-2023**

INDIKATOR SASARAN	Level Pemerintah	REALISASI		
		2021	2022	2023
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Kota Yogyakarta	A	A	A
	Provinsi D.I.Yogyakarta	AA	AA	AA
	Pusat	-	-	-



INDIKATOR SASARAN	Level Pemerintah	REALISASI		
		2021	2022	2023
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP*
	Provinsi D.I.Yogyakarta	WTP	WTP	WTP*
	Pusat	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP*</b>

Sumber: KemenPAN/RB, BPK, Bappeda (diolah)

\*Proyeksi

Sesuai dengan tabel di atas bahwa capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Kota Yogyakarta pada 2023 masih berada di bawah capaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendapatkan predikat tertinggi AA dan masih menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat tersebut. Namun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta masuk ke dalam daftar 20 pemerintah daerah (5 Provinsi, 10 Kabupaten, 5 Kota) dengan predikat A dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada evaluasi AKIP Tahun 2023. Selanjutnya untuk capaian indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada 2023 telah setara dengan capaian tingkat provinsi dan tingkat pusat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP merupakan predikat tertinggi dari opini hasil pemeriksaan/audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas KemenPAN/RB Tahun 2023, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 kembali memperoleh predikat A dengan nilai sebesar 84,17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti terlihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 3.7 Nilai Akuntabilitas Pemkot Yogyakarta Tahun 2017-2023**

Sumber : Bappeda (2023, diolah)

## 6. Kapasitas Tata Kelola Pemerintah

Penggunaan angka harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan angka harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

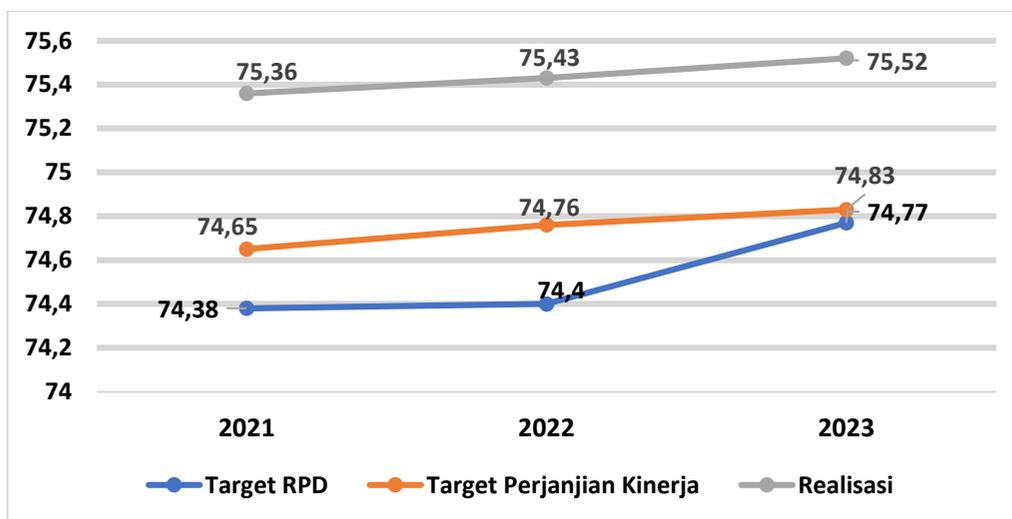


Angka harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu daerah, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Hasil pengukuran sasaran harapan hidup masyarakat meningkat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023**

	2021	2022	2023
Target RPJMD/ RPD	74,38 th	74,4 th	74,77 th
Target Perjanjian Kinerja	74,65 th	74,76 th	74,83 th
Realisasi	75,36 th	75,43 th	75,52 th
<b>Capaian</b>	<b>100,95%</b>	<b>100,89%</b>	<b>100,92%</b>

Sumber: Bappeda dan BPS (2023, diolah)



**Gambar 3.8 Grafik Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Tahun 2021-2023**

Sumber: BPS (2023, diolah)

Tabel di atas menunjukkan angka harapan hidup saat lahir Kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2023. Angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2023 adalah sebesar 75,52. Angka ini meningkat sebesar 0,09 tahun jika dibandingkan realisasi 2021 (75,43 tahun). Hal tersebut menandakan bahwa kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk Kota Yogyakarta cenderung semakin meningkat.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Nasional dan D.I. Yogyakarta angka harapan hidup Kota Yogyakarta tersaji dalam tabel berikut ini:

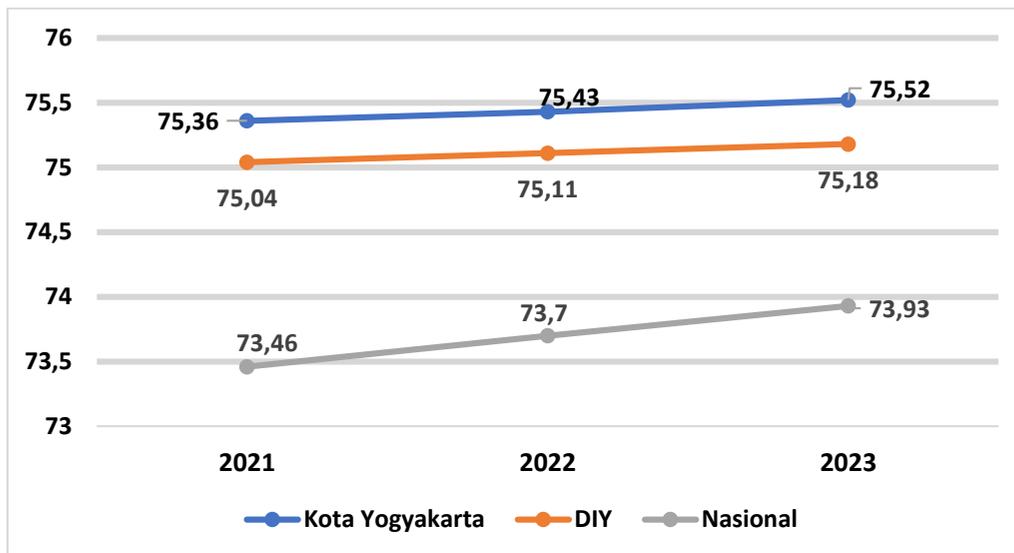
**Tabel 3.18 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023**

	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	75,36 th	75,43 th	75,52 th
DIY	75,04 th	75,11 th	75,18 th



Nasional	73,46 th	73,7 th	73,93 th
----------	----------	---------	----------

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023, diolah)



**Gambar 3.9 Perbandingan AHH Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023**

Sumber: BPS (2023, diolah)

Dalam kurun waktu 2021 – 2023 angka harapan hidup saat lahir Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional menunjukkan kecenderungan naik setiap tahunnya seperti tersaji dalam tabel di atas. Angka harapan hidup saat lahir Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan DIY, maupun Nasional.

**A.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Bappeda Kota Yogyakarta di tahun 2023, antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu dan hilir.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong gerakan untuk meningkatkan upaya pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui pembatasan, daur ulang serta pemakaian ulang sampah sehingga mengurangi jumlah sampah akhir yang harus dibuang di TPST Regional Piyungan. kondisi ketergantungan pengelolaan sampah terhadap TPST Regional Piyungan, permasalahan di lapangan dalam praktiknya terlihat jelas ketika muncul kendala teknis maupun nonteknis pada operasionalisasi TPST Regional Piyungan. Salah satunya adalah berupa dampak instan banyaknya timbunan sampah yang merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta dan memunculkan istilah viral "Jogja Darurat Sampah".

Situasi tersebut jelas memberikan dampak negatif terhadap visual kota yang tentunya mencoreng citra Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan pariwisata. Terdapat beberapa rekomendasi program prioritas yang memerlukan tindak lanjut berupa perumusan kajian yang bersifat lebih teknis/spesifik. Dengan berdasarkan kebutuhan tersebut, maka pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta, menyelenggarakan Kegiatan Kajian Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Di dalam naskah akademik Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2031 disebutkan bahwa untuk mewujudkan visi penanganan sampah yang optimal bagi seluruh masyarakat dengan misi mewujudkan kelembagaan mandiri daerah dalam operasional penanganan sampah, maka tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakannya selain menyangkut UPTD dengan PPK BLUD dan BUMD juga menyangkut terkait lembaga atau kelompok swadaya masyarakat (KSM). Prinsip segmentasi tersebut juga dapat diterapkan di Kota Yogyakarta, sebagai contoh untuk KSM ke depannya dapat diterapkan pada skala paling kecil, yaitu RW, hingga pada pengelolaan TPS3R. Meskipun pada masterplan yang sudah ditetapkan diketahui bahwa pada TPS3R sarannya dikelola dengan BLUD atau oleh BUMD namun berdasarkan hasil Focus Group Discussion dengan stakeholder terkait diketahui bahwa terdapat gagasan nantinya TPS3R di Nitikan yang dirancang sebagai Pilot Project dapat dilaksanakan oleh KSM untuk menumbuhkan kesadaran dan sekaligus keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan persampahan di Kota Yogyakarta. Berikut Pilot Project Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan Lingkungan yang bisa diaplikasikan di Kota Yogyakarta :

**A. Konsep Sistem Penanganan Sampah Berdasarkan Lokasinya**

Ditinjau dari lokasi penanganannya, terdapat dua jenis sistem pengelolaan sampah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Umumnya penanganan sampah dengan sistem sentralisasi ditangani di TPA, akan tetapi untuk konteks Yogyakarta yang tidak memiliki lahan cukup luas untuk membangun TPA serta memiliki ukuran kota yang kecil maka standar sentralisasi tersebut dapat diasumsikan diturunkan menjadi level TPS atau TPS3R. Kemudian terkait dengan desentralisasi diasumsikan pada level kecamatan atau bahkan skala yang lebih kecil lagi kelurahan.

**B. Konsep Pengelolaan Persampahan Berbasis Kawasan di 2 lokasi *Pilloting***

1. Konsep rencana pengembangan model pengelolaan sampah terpadu di Area TPST Karangmiri, secara umum terbagi dalam (1) Penerapan Konsep Zero Waste dan Sirkular Ekonomi, dan (2) Pembangunan Area TPST Karangmiri namun masih dibutuhkan intervensi pengembangan fisik area TPST Karangmiri tersebut.
2. TPS3R Nitikan secara umum berbasis pengolahan sampah organik dengan proporsi pengolahan sampah anorganik yang rendah. TPS3R Nitikan Berdasarkan kondisi yang ada, diusulkan rekomendasi berupa renovasi bangunan dan pemberian barrier tanaman.

**C. Rancangan Model Depo pada Kawasan Pusat Kegiatan**

Depo TPS Lempuyangan, depo TPS Sagan, depo TPS Kotagede yang dapat dilihat pada gambar berikut. Keberadaan depo/TPS ini dapat mengganggu kenyamanan visual, penghawaan, serta estetika. Desain yang diusulkan pada bangunan depo/TPS adalah pemberian dinding masif sebagai batasan area dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, perlu diberikan barrier tanaman, Barrier tanaman tersebut digunakan sebagai penyaring aroma dari area depo/TPS ke permukiman atau lingkungan sekitar.



Dari sisi hilir penyelesaian permasalahan sampah di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan akses pemanfaatan TPA Piyungan.

## 2. Adanya kenaikan Balita Stunting

Prevalensi stunting di kota Yogyakarta berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 adalah 13.8%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17.1%. Realisasi untuk tahun 2023 belum dirilis. Sehingga angka yang dipakai sebagai realisasi masih di angka 13.8 %. Untuk kebutuhan intervensi data BNBA yang dipakai adalah data yang dihasilkan dari Pemantauan Status Gizi (PSG). Berdasarkan data PSG jumlah balita stunting tahun 2022 sebesar 1.225 jiwa, sementara tahun 2023 jumlah balita stuntingnya ada 1.254. Ada kenaikan balita stunting yang kemudian ditindaklanjuti dengan tatalaksana kesehatan, sebagai akibat kenaikan cakupan balita yang ditimbang sebesar 5,75 %. Cakupan balita ditimbang tahun 2022 sebesar 79,44 % sementara tahun 2023 cakupan balita ditimbangnya naik menjadi 85,19 %.

Peningkatan persentase balita diukur, penurunan jumlah balita stunting dan turunnya prevalensi stunting dari tahun ke tahun akan terus di dorong ketercapaiannya, sekaligus menjawab rekomendasi dari DIY pada hasil penilaian 8 aksi konvergensi 2022 untuk meningkatkan capaian EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), sebab melalui capaian EPPGBM yang baik maka akan menggambarkan pemantauan kesehatan balita di wilayah (Kabupaten/Kota) juga baik dan intervensi dapat dilakukan dengan adekuat (memadai). Jika seluruh balita di wilayah terpantau di EPPGBM minimal 90% maka akan mendekati hasil SSGI sebagai ukuran angka stunting yang berlaku Nasional.

Dalam intervensinya dilakukan pula inovasi sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di kota Yogyakarta. Inovasi dilaksanakan dengan mengimplementasikan Konsep 5K (Kampung, Kampus, Pemkot, Korporat, Dan Komunitas) gandeng-gendong. Misalnya adalah lele cendol dan kampung sayur yang basisnya adalah kampung dan komunitas, juga memiliki keterkaitan dengan unsur pemkot dan korporat terutama terkait dengan fasilitasi infrastruktur dan pengembangan.

### 3. Penurunan Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2023 berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada dokumen Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2023 sebesar 6,49% atau sejumlah 29,48 ribu jiwa penduduk miskin. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,13% dari angka kemiskinan tahun 2022 yang berada pada angka 6,62% dan telah melampaui target tahun 2023 yang berada pada range 6,61% - 7,57%.

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Angka kemiskinan saat ini bahkan sudah berada di bawah angka kemiskinan sebelum pandemi. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan DIY, kemiskinan Kota Yogyakarta berada di bawah DIY dan menjadi yang terendah dibanding Kabupaten lain di DIY.

Meskipun angka kemiskinan saat ini sudah melampaui range target tahun 2023, perlu diingat bahwa terdapat kebijakan strategis nasional terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Dengan dikeluarkannya Inpres RI No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia ditargetkan selesai pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Terlebih lagi melalui Keputusan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, Kota Yogyakarta menjadi 1 diantara 302 Kabupaten/Kota yang ditetapkan menjadi perluasan Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 sehingga prioritas penanggulangan kemiskinan saat ini diprioritaskan pada penghapusan kemiskinan ekstrem.

Adapun tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 belum dirilis oleh BPS. Data terakhir yaitu tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrem berada pada angka 0,67% atau diestimasikan sebanyak 3,01 ribu jiwa. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,53% atau 2,34 ribu jiwa.

### 4. Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah di wilayah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah.

Fungsi LKK adalah sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan wilayah dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah.

Bappeda dengan Bagian Tata Pemerintahan Menskenariokan peran LKK dimasing-masing wilayah sehingga terdapat akselerasi peran masyarakat dalam pembangunan di wilayah. Pembagian peran tersebut juga menindaklanjuti dari Permendari 18 tahun 2018 ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pembagian peran ini dapat dimaksimalkan pada proses musrenbang sehingga permasalahan di wilayah dan optimalisasi potensi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja tersebut, pada tahun 2023 Bappeda Kota Yogyakarta tetap dapat meraih presentase target kinerja yang sangat baik. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan statistik dan penelitian pengembangan serta inovasi.
2. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dan juga penyelarasan perjanjian kinerja berbasis pohon kinerja.
3. Ketersediaan data-data pendukung dan analisa dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan antara Bappeda dengan Perangkat Daerah pengampu Program
4. Forum Rapat Dinas untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan sebagai pengganti Rapat Koordinasi Pengendalian.
5. Optimalisasi Desk Timbal Balik yang dilaksanakan setiap Tribulan.
6. Pelaksanaan Desk Sasaran Daerah.
7. Pendampingan pelaksanaan Desk Metadata Perangkat Daerah.
8. Pendampingan pelaksanaan Desk Penyusunan dokumen perencanaan
9. Pengembangan SIMONEVA sebagai aplikasi untuk pengendalian dari hulu sampai hilir.
10. Koordinasi yang lebih intensif dengan mitra perangkat daerah dalam hal perencanaan dan pengendalian.
11. Penumbuhan inovasi-inovasi melalui sosialisasi, workshop, diseminasi maupun pelaksanaan anugerah inovasi penelitian.
12. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda.

Alternatif/solusi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Penyusunan proses bisnis dan cross cutting visi misi dalam RPD untuk pencapaian sasaran daerah.
2. Melaksanakan evaluasi internal berupa rekonsiliasi SPJ/Keuangan, evaluasi capaian fisik dan keuangan, rekonsiliasi barang yang dilaksanakan setiap bulan.
3. Melaksanakan Kas Opname setiap tiga bulan dan stock opname barang setiap akhir tahun.
4. Mendorong kinerja SKPD pengampu program dalam mencapai target yang sudah disepakati dan melakukan desk / diskusi untuk menyamakan persepsi dalam memahami definisi operasional indikator program.



5. Koordinasi TKPK baik melalui FGD, sosialisasi tentang penanggulangan kemiskinan, Musrenbang kemiskinan, Pendampingan Tim Penanggulangan Kemiskinan (Penangkis) Kemantren dan Kelurahan serta intervensi lintas sektor melalui anggaran APBD masing-masing perangkat daerah yang termasuk dalam proses bisnis dan cross cutting sasaran menurunnya kemiskinan masyarakat.
6. Penerapan 8 aksi konvergensi penurunan stunting sebagai strategi penurunan stunting kota Yogyakarta tetap dilanjutkan untuk penanganan gizi balita buruk dan stunting.
7. Penyusunan Kajian Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Yogyakarta sebagai alternative solusi penutupan TPA Sampah Piyungan.
8. Workshop penyelenggaraan Kepariwisata Budaya dalam rangka menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan pariwisata dan budaya di Kota Yogyakarta.
9. Penyusunan Kajian pengembangan pasar, Bappeda Kota Yogyakarta menginisiasi adanya kegiatan pengembangan pasar rakyat yang berorientasi pada eksplorasi karakter atau ciri khas sebagai pasar unggulan dalam perwujudan program revitalisasi pasar rakyat sekaligus mendukung pengembangan ruang ekonomi kreatif.
10. Penyusunan Kajian Pengembangan UMKM Kota Yogyakarta, kajian ini diharapkan mampu menyediakan pelayanan ekonomi kepada masyarakat selain memperluas lapangan pekerjaan yang muaranya mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
11. Pengembangan aplikasi INTIVADA untuk mempermudah dalam melaksanakan monitoring evaluasi inovasi-inovasi yang ada di Kota Yogyakarta.
12. Pelaksanaan desk timbal balik evaluasi Renja setiap tribulan dengan mitra perangkat daerah.
13. Pelaksanaan Desk Sasaran Daerah dengan pengampu program pada perangkat daerah.
14. Kerjasama intensif dengan Dewan Penelitian dan Pengembangan dalam memberikan masukan kebijakan pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Kerjasama dengan Forum LPPM dengan menjalin sinergitas kebutuhan wilayah, kampung, komunitas, korporasi, dan perguruan tinggi dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi, kuliah kerja nyata dari perguruan tinggi di wilayah Kota Yogyakarta.

Dari hasil kinerja masing-masing bidang yang berhasil mencapai kinerja sasaran strategis, Bappeda memberikan penghargaan kepada bidang-bidang yang ada di Bappeda yang telah mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja baik capaian kinerja sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program serta juga memberikan penghargaan kepada Sekretariat sebagai pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda untuk sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perhitungan dari capaian kinerja ini dengan menggunakan formula 40% capaian program + 30% capaian realisasi fisik + 30% capaian keuangan.

Disamping itu juga sebagai tindak lanjut dari laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 dari Inspektorat dimana rekomendasi Bappeda adalah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal



sesuai dengan PeemenPAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda juga memberikan penghargaan sampai dengan level individu mulai secara berjenjang dari Pelaksana (Staf), Ketua Tim Kerja / Struktural Eselon IV, dan level Eselon 3 untuk Kabid/Sekretaris.

**A.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran indeks perencanaan pembangunan yang relatif sangat baik (106,11 %) serta hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat relatif sangat baik (109,53%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.19 berikut:

**Tabel 3.19**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5	98,18	106,14	<b>14.642.918.434</b>	<b>13.877.384.436</b>	<b>94,77</b>
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	AA	109, 53%			
	Belanja gaji dan tunjangan ASN					9.116.683.000	8.411.526.682	92,27
	Belanja operasional utama					3.997.690.853	3.988.705.708	99,77
	Belanja operasional pendukung					1.528.544.581	1.477.152.046	96,64
<b>Total Belanja</b>						<b>14.642.918.434</b>	<b>13.877.384.436</b>	<b>94,77</b>

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 3.20**

**Realisasi Anggaran Program Utama untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah meningkat	99,93%
			Kemanfaatan Analisa data dalam perencanaan pembangunan	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat	99,85%
			Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kemanfaatan penelitian dan pengembangan	99,57%
			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat	96,64%

Pada tabel 3.20 menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama untuk mendukung capaian kinerja perangkat daerah. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi anggaran pada program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 0,07%, atau Rp. 516.095,- dari anggaran sebesar Rp. 780.798.795,- dan realisasi sebesar Rp. 780.282.700,- Efisiensi tersebut ada pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah . Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja penggandaan dan belanja jamuan makan dan minum rapat.



Efisiensi anggaran selanjutnya pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 0,15% , atau Rp. 2.769.146,- dari anggaran sebesar Rp. 1.872.883.706,- dan realisasi sebesar Rp. 1.870.114.560 ,- Efisiensi tersebut terdapat pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja honorarium narasumber dan moderator, penggandaan dan belanja jamuan makan dan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah (transport peserta).

Efisiensi pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 0,43%, atau Rp. 5.699.904,- dari anggaran sebesar Rp. 1.344.008.352,- dan realisasi sebesar Rp. 1.338.308.448 ,- Efisiensi terdapat pada 4 kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Efisiensi terdapat pada belanja honorarium narasumber dan moderator, penggandaan dan belanja jamuan makan dan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah (transport).

Sedangkan untuk efisiensi program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 3,36% atau sebesar Rp. 51.392.535,- . dari anggaran sebesar Rp. 1.528.544.581,- dikarenakan adanya harga pembelian barang di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD, kendaraan bermotor dalam kondisi baik dan layak digunakan, sehingga kebutuhan akan pemeliharaan berkurang, serta rehabilitasi 76edung disesuaikan dengan kebutuhan.

**Tabel 3.21**  
**Analisis efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Indeks Perencanaan Pembangunan</b>		99,78%	0,12%
-	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian sasaran daerah meningkat		99,93%	0,07%
		Kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan			
-	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat			



No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
		Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat		99,85%	0,15 %
		Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat			
-	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kemanfaatan penelitian dan pengembangan dan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah		99,57%	0,43 %
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Kategori Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat</b>		<b>96,64%</b>	<b>3,36%</b>
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat		96,64%	3,36 %

Sasaran “Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah ” telah mencapai kinerja sebesar 98,18% atau pencapaian sebesar 106,14% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,12%. Sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai kinerja dengan predikat AA atau pencapaian sebesar 109,53% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,36%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana serta efisiensi sebelum perencanaan anggaran.

#### A.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Bappeda, didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu dari sasaran daerah, sasaran perangkat daerah maupun sasaran program perangkat daerah ataupun kegiatan yang ada di Bappeda. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya :

##### a. Program dan kegiatan bidang Perekonomian yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :

##### 1. Meningkatnya kualitas pariwisata

Lama tinggal atau Length of Stay (LoS) wisatawan yang menjadi indikator dari kualitas pariwisata di Kota Yogyakarta merupakan jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan mancanegara di luar negara tempat tinggalnya, Sedangkan menurut Badan Pusat



Statistik (BPS) Indonesia mengartikan bahwa rata-rata lama tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang menginap di akomodasi tersebut .

Tahun 2023 menjadi tahun pasca pandemi covid-19 dimana pada akhir tahun 2022 sudah dilakukan pencabutan terhadap kegiatan PPKM. Pemerintah Kota Yogyakarta menguatkan pariwisata sebagai salah satu koridor visi jangka panjang Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2025 yang dilanjutkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026, yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya. Hasil positif didapatkan pada peningkatan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2023. Hasil kajian Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta per 10 Desember 2023 menunjukkan target lama tinggal wisatawan sebesar 1,7 hari di tahun 2023 telah tercapai pada angka 1,87 hari atau dengan kata lain tercapai sebesar 110%.

Dalam upaya peningkatan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan proses bisnis dalam upaya peningkatan kualitas pariwisata. Upaya tersebut tergambar dalam 3 proses yakni utama, pendukung dan manajemen. Proses utama terdiri dari 4 kegiatan yakni peningkatan daya Tarik wisata, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, penguatan branding pariwisata dan penguatan kelembagaan dan SDM Pariwisata. Adapun proses pendukung nya adalah peningkatan kualitas layanan industri pariwisata dan Peningkatan aksesibilitas. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan leading sector untuk peningkatan kualitas pariwisata dengan didukung oleh perangkat daerah lain sesuai dengan proses bisnis.

**Gambar 3.10**  
**Proses Bisnis Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata**



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

## 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu

wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sempat mengalami kontraksi sebesar -2,42 persen pada Tahun 2020 sebagai dampak pandemic covid-19. Pada tahun 2021 perekonomian Kota Yogyakarta mengalami bounce back dan tumbuh sebesar 5,16 persen. Tahun 2022 perekonomian secara umum menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan Kota Yogyakarta tumbuh pada angka 5,12 persen. Mendasarkan pada data series pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tersebut dan rilis pertumbuhan ekonomi DIY sampai dengan triwulan III, maka pada akhir tahun 2023, ekonomi Kota Yogyakarta tumbuh sebesar 5,07 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil rilis Bank Indonesia terhadap perekonomian DIY yang diprediksi tumbuh sebesar 4,96 persen dan nasional yang diprediksi tumbuh sebesar 4,94 persen.

Sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu upaya perwujudan Misi ke-3 Kota Yogyakarta, “Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta Yang Unggul Dalam Pelayanan Jasa” serta salah satu perwujudan visi RPD yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Sasaran daerah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” dapat diukur melalui indikator angka pertumbuhan ekonomi.

Proses bisnis sasaran 3 ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Manajemen, Utama dan Pendukung. Proses Manajemen merupakan aspek dasar yang ada pada semua upaya pencapaian sasaran daerah, didalamnya meliputi aspek Perencanaan; Penganggaran; Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana, dan SDM; serta Pengelolaan Sistem, Pengendalian dan Pengawasan.

Terdapat 4 Perangkat Daerah yaitu Dinas PerinkopUKM, Dinas Perdagangan, DPMPTSP dan Dinas Sosial Nakertrans memiliki peran sebagai perangkat daerah utama pengampu sasaran 3. Dinas PerinkopUKM menjadi OPD pembina bagi UMKM rintisan dan pembinaan lanjutan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Sementara DPMPTSP mengawal penciptaan iklim investasi yang kondusif, promosi dan pengawalan terhadap investasi itu sendiri. UMKM dari sisi perijinan dan ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Sosial Nakertrans. Selain 4 OPD diatas terdapat OPD supporting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dinas Dikpora mendukung pembentukan wirausaha muda, sementara Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan dari sisi produk UMKM khususnya pangan yang aman dan higienis. DP3AP2KB mempunyai program pembinaan UMKM dengan sasaran kelompok wanita dan difabel. Kominfosan mengawal ekonomi digital dengan menyediakan layanan pemasaran berbasis web yaitu e-dodolan dan nglarisi serta 14 kemantren melaksanakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.



**Gambar 3.11**  
**Proses Bisnis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**



Sumber: Bappeda (2022, diolah)

**b. Program dan kegiatan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :**

**1. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat, yang harus mengacu pada rencana tata ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat terhadap struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya secara terukur dan objektif.

Pengukuran persentase kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan luas rencana dalam dokumen RDTR dengan luas eksisting pada tahun 2023, sehingga menghasilkan nilai sebesar 85,22%. Kesesuaian ini naik sebesar 2,69% dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 82,53%. Pengukuran sasaran ini menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yakni persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, dengan ketercapainnya pada tahun 2023 sebesar 121,74% (Sangat Tinggi). Tercapainya target kesesuaian ruang ini didasarkan pada perhitungan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang lebih

detail berbasis pola ruang masing-masing wilayah dan usaha pengendalian dan pengawasan tata ruang.

Untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang, diperlukan pemetaan akar permasalahan yang dilakukan dengan menyusun proses bisnis yang berisi uraian aktivitas utama, pendukung, dan manajemen.

## 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya perwujudan misi ke-4 RPD Kota Yogyakarta 2023-2026, “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan”. Sasaran daerah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dapat diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari : (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO<sub>3</sub>, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada 2021-2023 masih berada di bawah capaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Hal ini disebabkan beberapa faktor dari nilai IKA, IKU dan IKL. Indeks Kualitas Air cenderung menurun dikarenakan masih terdapat sampah dan limbah yang mengalir di sungai yang sulit untuk dihilangkan.

Sedangkan pencemaran udara masih bisa dikendalikan walaupun terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi dapat mempengaruhi penurunan kualitas udara namun bertambahnya kerapatan tanaman perindang, melakukan kegiatan uji emisi dalam rangka sosialisasi untuk mewujudkan kendaraan yang rendah emisi dalam upaya mengurangi polusi udara dan pembangunan RTHP baru di kawasan permukiman yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

Selain itu ada upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lahan dalam menopang kualitas lingkungan hidup antara lain : Membangun RTHP di beberapa lokasi dengan proporsi perkerasan dan hijauan sesuai dengan Perwal 17/2021, Meningkatkan kualitas lahan dengan parameter angka IKL pada tahun ini, dll.

Proses bisnis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memetakan intervensi dilakukan oleh OPD mendukung pencapaian suatu sasaran. Setiap sasaran memiliki proses bisnis utama, pendukung dan manajemen. Proses bisnis aspek manajemen setiap sasaran memiliki elemen yang sama, yaitu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana dan SDM, serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Sementara itu untuk aspek utama dan pendukung, setiap sasaran memiliki proses bisnis masing-masing. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sementara itu, aspek pendukung terdiri dari pemberdayaan masyarakat.



Terdapat 6 OPD yang memiliki peran pada proses utama adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sedangkan pada proses pendukung, terdapat 2 OPD yakni Kesehatan dan 14 Kecamatan pada aspek pemberdayaan masyarakat.

**Gambar 3.12**  
**Proses Bisnis Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**



Sumber: Bappeda (2023)

### 3. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran daerah Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan salah satu upaya perwujudan Misi ke-7 Kota Yogyakarta, “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai”. Sasaran daerah “Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” dapat diukur melalui indikator menurunnya angka kriminalitas dan menurunnya jumlah pelanggaran perda.

Angka kriminalitas sepanjang tahun 2021-2023 terlihat mengalami kenaikan dari angka realisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan di Kota Yogyakarta mulai perlu mendapat perhatian kasus. Peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi karena aktivitas masyarakat sudah kembali normal pasca melewati masa pandemi. Kasus kriminalitas yang menonjol pada tahun 2023 di Kota Yogyakarta antaranya kasus narkoba sebanyak 159 kasus, kasus penipuan/penggelapan sebanyak 129 kasus, kasus pencurian sebanyak 77 kasus, kasus penganiayaan sebanyak 69 kasus, serta kasus pengeroyokan sebanyak 53 kasus.

Jika dilihat dari jenis kasusnya terdapat pergeseran dominasi kasus penyumbang terbesar angka kriminalitas dari tahun 2022. Pada tahun 2022 angka kriminalitas didominasi oleh kasus penipuan sebanyak 139 kasus, pencurian sebanyak 90 kasus, serta curanmor sebanyak 75 kasus. Angka kriminalitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dan 2022 cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman (1.330 kasus di tahun 2022) dan Kabupaten Bantul (2.409 kasus di tahun 2022). Pada tahun 2022 angka kriminalitas Kota Yogyakarta juga lebih rendah dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar 5.166 kasus kriminalitas.



Selain angka kriminalitas, sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat dari indikator jumlah pelanggaran perda. Indikator pelanggaran perda terlihat mengalami penurunan secara bertahap. Dapat diasumsikan bahwa kehidupan bermasyarakat sudah kembali normal. Hal ini juga menggambarkan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan Pemkot Yogyakarta khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) sebagai perangkat daerah utama pengampu telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan.

Proses bisnis sasaran 9 ini dijabarkan menjadi 3 proses yaitu Manajemen, Utama dan Pendukung. Proses Manajemen merupakan aspek dasar yang ada pada semua upaya pencapaian sasaran daerah, didalamnya meliputi aspek Perencanaan; Penganggaran; Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana, dan SDM; serta Pengelolaan Sistem, Pengendalian dan Pengawasan. Proses utama merupakan upaya inti yang dilakukan dalam mengintervensi sasaran 9 dan tentu saja berbeda dengan upaya yang dilakukan untuk intervensi sasaran daerah lain. Terakhir dalam proses bisnis ini dijelaskan bahwa dalam melakukan intervensi penurunan gangguan keamanan dan ketertiban juga perlu dukungan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

**Gambar 3.13**  
**Proses Bisnis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Menurun**



Sumber: Bappeda (2022, diolah)

#### 4. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-delapan yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas” dan tujuan “Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah”. Sasaran ini memiliki satu indikator yakni Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Indeks ini tersusun atas beberapa komponen yang dihitung dari capaian pembangunan infrastruktur dari perangkat daerah yaitu Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPBD dan Dinas Kebakaran. Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2023 terealisasi sebesar 92,67 dari target 89,82. Dengan realisasi tersebut, capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-10 pada tahun 2023 adalah sebesar 103,17% dengan kategori predikat sangat tinggi.

Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menjadi penting untuk memberikan pelayanan masyarakat dan terus meningkatkan infrastruktur wilayah, bukan sekedar meningkat secara kualitas namun juga dapat berkembang dan terpadu. Dalam upaya mencapai hal tersebut, disusunlah proses bisnis yang meliputi aktivitas utama, pendukung dan manajemen beserta cross cutting yang digunakan sebagai framework kebijakan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Gambar 3.14**  
**Proses Bisnis Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah**



*Sumber Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022*

Dalam proses bisnis tersebut dipetakan aktivitas utamanya serta 2 aktivitas lain yaitu aktivitas manajemen dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama yang merupakan inti dari keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari 5 hal, yaitu peningkatan infrastruktur pekerjaan umum, peningkatan infrastruktur permukiman, peningkatan pengelolaan sampah perkotaan, peningkatan infrastruktur kebencanaan serta peningkatan infrastruktur perhubungan. Sedangkan aktivitas manajemen, sama seperti setiap sasaran lainnya memiliki 4 elemen yang sama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana, dan SDM, serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Dan aktivitas pendukung adalah aktivitas yang diperlukan untuk mendukung keseluruhan proses utama yang berjalan, yang ada pada aktivitas ini adalah Partisipasi Masyarakat.

Setiap aktivitas yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang menjadi ketugasan satu atau beberapa Perangkat Daerah. Perangkat daerah memegang peran masing-masing dalam melaksanakan proses bisnis sasaran 10 ini. Dalam aktivitas utamanya, peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas PUPKP, peningkatan infrastruktur permukiman juga dilakukan oleh Dinas PUPKP beserta Kemantren. Untuk peningkatan pengelolaan sampah perkotaan, selain DLH, kemantren masih menjadi Perangkat Daerah yang mampu, sedangkan peningkatan infrastruktur kebencanaan menjadi tanggung jawab 3 Perangkat Daerah yaitu BPBD, Dinsosnakertrans dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk peningkatan infrastruktur perhubungan diampu oleh Dinas Perhubungan serta Dinas PUPKP. Sedangkan Perangkat Daerah yang menjadi pendukung dalam Partisipasi Masyarakat adalah Kemantren.

**c. Program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :**

**1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 9 misi, adapun misi yang pertama adalah mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Untuk mewujudkan misi pertama, ditetapkan sasaran daerah yang berupa meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah. Penetapan sasaran dan indikatornya tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Kegunaan indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Interpretasi dari tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Realisasi angka rata – rata lama sekolah tahun 2021 – 2023 selalu melampaui target yang ditetapkan, baik berdasarkan target RPJMD maupun target review renstra/perbaikan kinerja. Meskipun demikian, untuk mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang merupakan visi jangka penjang maka upaya peningkatan rata–rata lama sekolah penduduk Kota Yogyakarta tetap perlu dilakukan.

Dalam upaya keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan tidak terlepas dari upaya penyusunan proses bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran pertama meningkatnya kualitas pendidikan didukung dengan 3 aspek utama yaitu aspek manajemen, utama, dan pendukung. Aspek manajemen terdiri dari unsur perencanaan dan penganggaran terdiri dari pengelolaan organisasi, tata laksana dan SDM serta pengelolaan system, pengendalian, dan pengawasan. Aspek utama terdiri dari unsur pendidikan SD, pendidikan SMP, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat. Sementara aspek pendukung terdiri dari unsur peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standard dan sarpras pendidikan, penguatan data dan informasi, pengembangan budaya literasi, pendidikan inklusi.



**Gambar 3.15**  
**Proses Bisnis Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan**



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

## 2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Salah satu indikator sasaran RPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yaitu menurunnya kemiskinan masyarakat. Sasaran ini menggunakan tolok ukur angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan BPS ini dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yaitu dengan memandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan ini dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan ini kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi 2 kelompok yaitu tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan dan tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan diestimasi proporsinya dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei sehingga muncul angka/tingkat kemiskinan.

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 6,49. Angka ini menunjukkan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 6,49 % penduduk miskin dari keseluruhan populasi penduduk. Angka kemiskinan ini terus menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 7,69 dan tahun 2022 sebesar 6,62. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun strategy sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, telah disusun suatu proses bisnis pencapaian sasaran daerah yang keempat ini. Framework intervensi untuk penurunan angka kemiskinan bisa dijabarkan sebagai berikut.



**Gambar 3.16**  
**Proses Bisnis Menurunnya Kemiskinan Masyarakat**



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Proses bisnis ini memetakan intervensi dilakukan oleh OPD mendukung pencapaian suatu sasaran. Setiap sasaran memiliki proses bisnis utama, pendukung dan manajemen. Proses bisnis aspek manajemen setiap sasaran memiliki elemen yang sama, yaitu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana dan SDM, serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Sementara itu untuk aspek utama dan pendukung, setiap sasaran memiliki proses bisnis masing-masing. Penurunan sasaran penanggulangan kemiskinan terdiri dari perlindungan sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, infrastruktur wilayah, peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan. Sementara itu, aspek pendukung terdiri dari penguatan data informasi dan penguatan kelembagaan.

### 3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

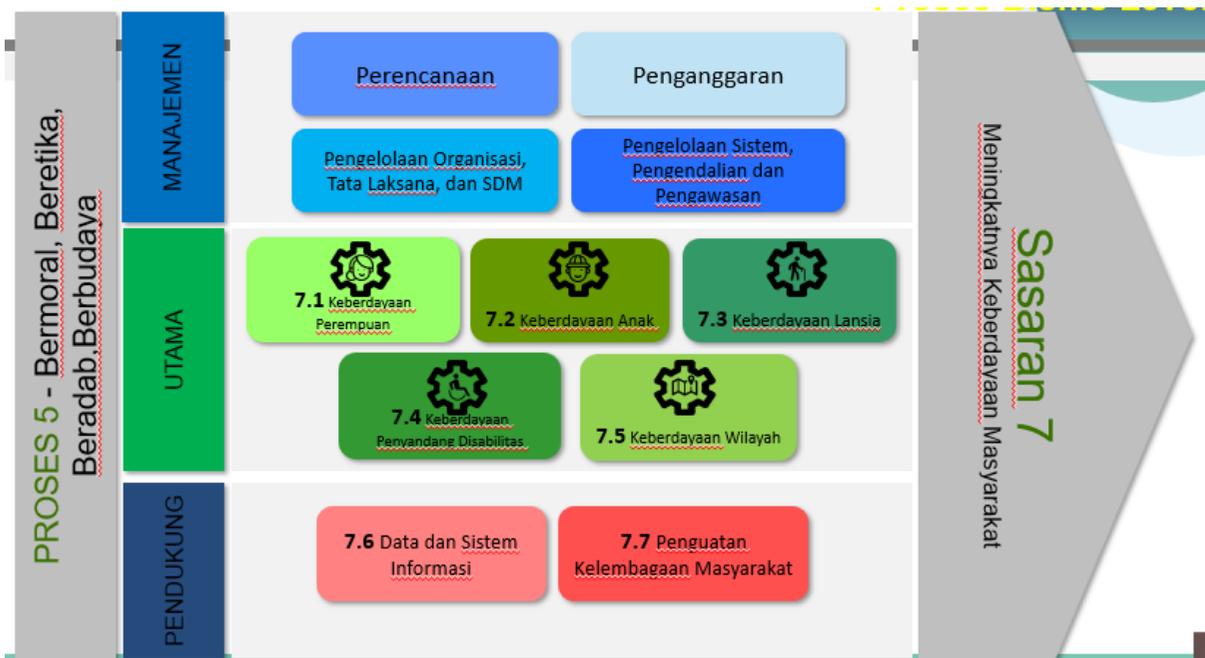
Meningkatnya keberdayaan masyarakat merupakan satu diantara 11 sasaran strategis daerah yang tercantum dalam RPD 2013-2026. Ukuran keberhasilan yang digunakan adalah indeks keberdayaan masyarakat. Seiring dengan pembangunan di Kota Yogyakarta, keberdayaan masyarakat yang diukur dari indeks tersebut diharapkan semakin meningkat.

Indeks keberdayaan masyarakat pada tahun 2021 dan 2022 dihitung dari komposit tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan dan persentase anak yang tidak mengalami kekerasan. Tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dihitung dari deklarasi tematik yang dilakukan oleh masing-masing kampung. Sedangkan persentase perempuan dan persentase anak tidak mengalami kekerasan diperoleh dari jumlah keseluruhan masing-masing populasi dikurangi dengan jumlah kasus kekerasan masing-masing populasi dibagi dengan masing-masing populasi dan dengan masing-masing dikali 100%. Sedangkan untuk tahun 2023 ini indeks keberdayaan masyarakat dihitung dengan menggunakan formula baru yaitu kombinasi dari Capaian Nilai Perkembangan

Pembangunan Wilayah, Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Predikat hasil penilaian KLA dari Kementerian PPPA), Indikator Kota Ramah Lansia dan Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas) Kota Yogyakarta.

Framework intervensi untuk peningkatan keberdayaan masyarakat bisa dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.17**  
**Proses Bisnis Keberdayaan Masyarakat Meningkat**



Sumber: Bappeda (2023, diolah)

Proses bisnis utama atau yang berkaitan dengan intervensi secara langsung dilakukan oleh banyak OPD. OPD yang terkait dengan peningkatan keberdayaan perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Selain itu DP3AP2KB bersama dengan Dinsosnakertrans mengampu untuk aspek keberdayaan anak. Dinsosnakertrans juga melakukan intervensi terhadap aspek Meningkatnya Keberdayaan Lansia dengan Musrenbang Tematik Lansia. Sedangkan untuk meningkatnya Keberdayaan Penyandang Disabilitas juga dilaksanakan Musrenbang tematik disabilitas.

#### 4. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran strategis kedelapan ‘Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan’ merupakan upaya untuk mencapai misi keenam yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026, yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”. Untuk mengukur sasaran kedelapan ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah 100% dengan kategori predikat sangat tinggi.

Capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Kota Yogyakarta pada 2023 masih berada di bawah capaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendapatkan predikat tertinggi AA dan masih menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat tersebut. Namun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta masuk ke dalam daftar 20



pemerintah daerah (5 Provinsi, 10 Kabupaten, 5 Kota) dengan predikat A dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia pada evaluasi AKIP Tahun 2023. Selanjutnya untuk capaian indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada 2023 telah setara dengan capaian tingkat provinsi dan tingkat pusat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP merupakan predikat tertinggi dari opini hasil pemeriksaan/audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.

Framework kebijakan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan disajikan dalam bagan berikut ini :

**Gambar 3.18**  
**Proses Bisnis 'Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan'**



Sumber : Bappeda (2022, diolah)

Seperti juga halnya dengan pencapaian sasaran sebelumnya, tiga proses yang dilakukan adalah proses manajemen, utama dan pendukung. Proses manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, tatalaksana dan SDM serta pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Proses utama merupakan inti dari pencapaian sasaran, peran besar dari masing masing Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk menjadi kunci meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Terdapat tujuh aspek dalam proses utama yaitu 1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, 2) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset, 3) Manajemen ASN, 4) Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan, 5) Penguatan Pengawasan, 6) Penataan Peraturan Perundangan, dan 7) Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Sedangkan Proses Pendukung adalah proses yang dibutuhkan keberadaannya untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pencapaian sasaran. Penguatan Inovasi, Pengembangan E-Government dan Manajemen Kearsipan serta Peningkatan Kerja Sama Daerah menjadi dukungan penting dalam tata kelola pemerintah, terlebih dewasa ini pemenuhan pelayanan publik membutuhkan kolaborasi, inovasi dan teknologi terkini.

5. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan**



**Lingkungan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 9 misi, salah satunya adalah **mewujudkan Kota Yogyakarta sehat**. Untuk mewujudkan misi tersebut, ditetapkan sasaran daerah yang berupa **meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** dengan **indicator angka harapan hidup**. Penetapan sasaran dan indikatornya tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Penggunaan angka harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan angka harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Angka harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu daerah, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Angka harapan hidup saat lahir Kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2023. Angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2023 adalah sebesar 75,52. Angka ini meningkat sebesar 0,09 tahun jika dibandingkan realisasi 2021 (75,43 tahun). Hal tersebut menandakan bahwa kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk Kota Yogyakarta cenderung semakin meningkat.

Proses bisnis dan framework kebijakan peningkatan angka harapan hidup menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan berkontribusi secara penuh dalam pencapaiannya, yaitu pada aspek peningkatan kesehatan perorangan dan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, regulasi bidang kesehatan, pengembangan data dan sistem informasi, pengembangan tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Peningkatan kesehatan perorangan dan masyarakat berfokus pada peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan dan kerja, serta peningkatan promosi kesehatan masyarakat.

**Gambar 3.19**  
**Proses Bisnis Sasaran 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**



Sumber: Bappeda (2022, diolah)

#### **A.1.7. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang menysasar 5 kelompok rentan yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.**

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, lebih khususnya di sistematika penyusunan dokumen renja tidak tercantum secara eksplisit untuk menyertakan dokumen GAP/GBS sebagai salah satu syarat dalam penyusunannya. Ketatnya tatakala perencanaan yang dimulai dari musyawarah rencana pembangunan kelurahan (musrenbangkel) pembahasan rencana kerja organisasi perangkat daerah dan penetapan RKPD sebagai muara akhir penyusunan dokumen perencanaan, sementara terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM di internal Bappeda dan belum adanya keterlibatan DPMPPA sebagai OPD yang mengawal langsung terkait isu gender membuat dokumen perencanaan belum sepenuhnya tajam dalam menganalisis dan menterjemahkan isu gender di dalam dokumen perencanaannya dalam hal ini yang tertuang dalam GAP/GBS.

Pada tahun 2023 kegiatan yang ada di Bappeda yang sudah menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai salah satu kegiatan yang sudah memenuhi unsur Perencanaan Penganggaran Perspektif Gender adalah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 344.331.360,-.

Dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan dengan memperhatikan 5 kelompok afirmasi gender sehingga perencanaan pembangunan lebih berperspektif gender, maka disusunlah rencana aksi dalam sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebagai berikut :

1. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat yang berperspektif gender dengan optimalisasi koordinasi sektor Kesejahteraan rakyat
2. Pengendalian dan evaluasi sektor kesejahteraan rakyat
3. Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD dan TKPK Kelurahan.
4. Pengelolaan data sektor kesejahteraan rakyat.
5. Pengembangan Layanan Lansia Terintegrasi dan replikasinya.
6. Survei Kota Ramah Lansia.
7. Musrenbang Tematik Kemiskinan
8. Penyusunan Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan.
9. Penyusunan Raperwal Grand Desain Kota Layak Anak

### A.1.8. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja

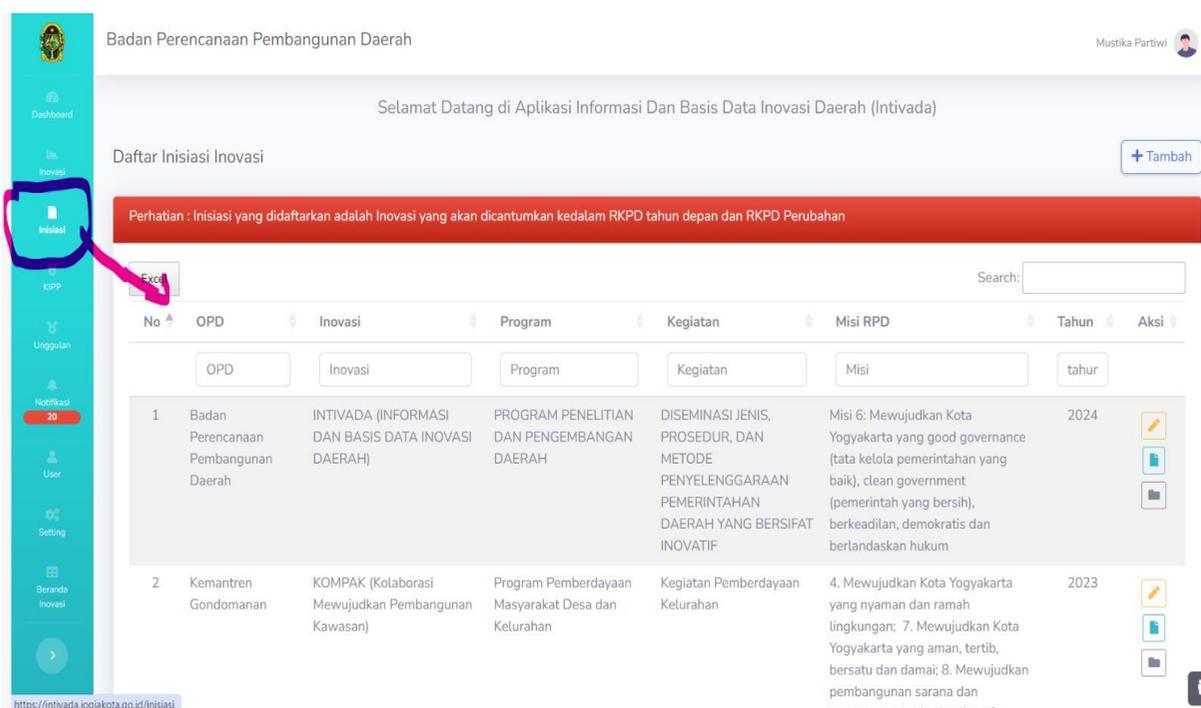
Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Batasan Inovasi Daerah mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2017 pasal 2 disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Untuk Inovasi yang dilaksanakan Bappeda Kota Yogyakarta dalam rangka untuk pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah :

1. Pengembangan aplikasi Intivada (Informasi dan basis data Inovasi Daerah)

Intivada adalah sebuah aplikasi data base seluruh inovasi Pemkot Yogyakarta. Aplikasi ini memuat profil inovasi beserta data dukung yang inline dengan sistem Innovation Government Award Kementerian Dalam Negeri. Setiap OPD mempunyai akun untuk meng-update data dan status inovasi masing-masing di aplikasi ini. Terdapat juga fitur yang khusus diperuntukkan bagi tamu Pemkot Yogyakarta untuk dapat melihat-lihat inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah update data inovasi serta mempermudah monev terhadap inovasi-inovasi yang ada.

Pengembangan aplikasi intivada berupa penambahan fitur inisiasi dan fitur upload inovasi ke aplikasi Innovative Government Awards, penambahan fitur unduh data inovasi dari aplikasi IGA ke aplikasi Intivada, penambahan fitur survey dan deskripsi singkat inovasi unggulan.





No	OPD	Inovasi	Tahapan	Implementasi	Kategori	Jenis	Rekomendasi	Aksi
1	Kemantren Ngampilan	Layanan Terpadu Keluar Bersama	Penerapan	24/07/2017	Pelayanan Publik	Digital		
2	Dinas Kesehatan	Sahabat BONZI	Penerapan	06/10/2017	Pelayanan Publik	Digital		
3	Dinas Kesehatan	SIPP-Mas (Sistem Informasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Penerapan	23/08/2017	Tata kelola Pemerintah Daerah	Digital		
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	e-SURe MENUJU JOGJA TANPA KUMUH (ELECTRONIC SLUM UPGRADING REPORTS MENUJU JOGJA TANPA KUMUH) Sebuah Sistem Informasi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta	Penerapan	01/10/2017	Pelayanan Publik	Digital		

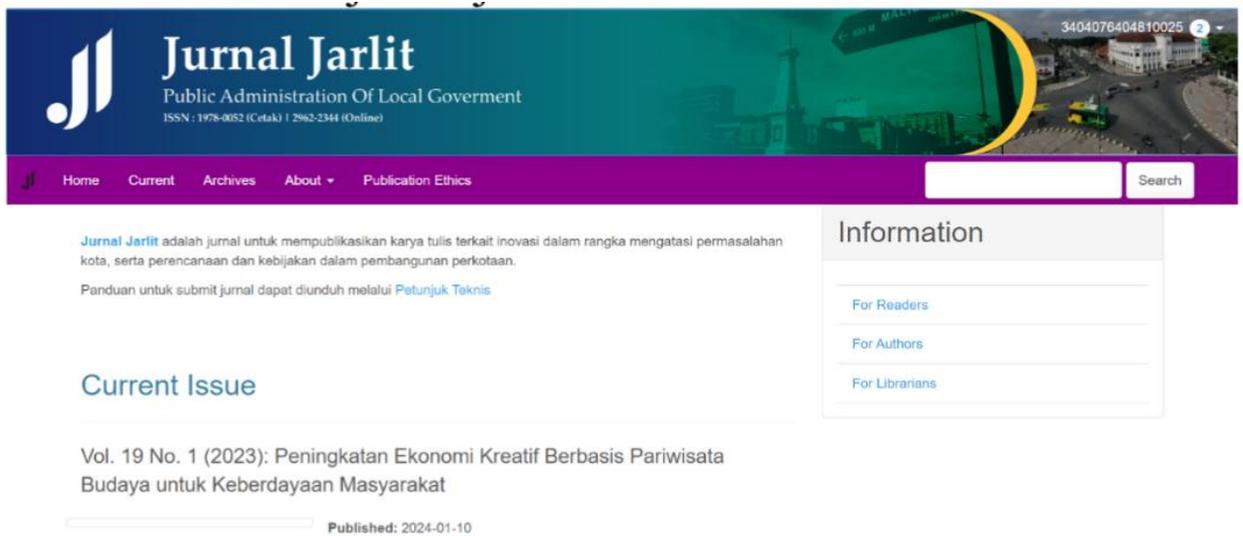
No	OPD	Inovasi	Tahapan	Implementasi	Kategori	Jenis	Rekomendasi	Aksi
1	Kemantren Ngampilan	Layanan Terpadu Keluar Bersama	Penerapan	24/07/2017	Pelayanan Publik	Digital	IGA, KIPP, PPD	
2	Dinas Kesehatan	Sahabat BONZI	Penerapan	06/10/2017	Pelayanan Publik	Digital		
3	Dinas Kesehatan	SIPP-Mas (Sistem Informasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Penerapan	23/08/2017	Tata kelola Pemerintah Daerah	Digital		
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	e-SURe MENUJU JOGJA TANPA KUMUH (ELECTRONIC SLUM UPGRADING REPORTS MENUJU JOGJA TANPA KUMUH) Sebuah Sistem Informasi Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta	Penerapan	01/10/2017	Pelayanan Publik	Digital		

## 2. E- Jurnal

Pengembangan Jurnal Jarlit (Jaringan Penelitian) di Kota Yogyakarta sudah dimulai dari tahun 2006 namun publikasinya baru sebatas buku cetak dengan nomor ISSN 1978-0052 , materi dari Jurnal Jarlit yaitu diambil dari penelitian tematis setiap tahunnya yang merupakan kerjasama Kota Yogyakarta dengan Perguruan Tinggi di DIY.

Pada tahun 2021 Jurnal Jarlit berinovasi untuk melakukan publikasi secara online atau OJS (Open Journal System) dan tahun 2023 berubah menjadi e-Jarlit. Untuk publikasi pada OJS (Open Journal System) berada pada <https://journal.jogjakota.go.id> dengan nomor eISSN 2962-2344. Saat ini eJarlit telah mencapai vol.19 dan tetap konsisten untuk melakukan publikasi di setiap tahun. Selain itu, eJarlit juga melakukan kolaborasi dengan berbagai Perguruan Tinggi untuk menjadi reviewer dalam eJarlit.

Jurnal Jarlit (Jaringan Penelitian) ini untuk mempublikasikan karya tulis terkait inovasi dalam rangka mengatasi permasalahan kota, serta perencanaan dan kebijakan dalam pembangunan perkotaan.



### 3. Penjaringan partisipasi masyarakat lewat online

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 akan menyusun rancangan awal RPJPD 2025-2045. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat untuk perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan. Mengingat keterbatasan waktu, ruang, anggaran dan sumber daya, maka dibuatlah metode penjaringan masyarakat tersebut secara online. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai Kota Yogyakarta yang diharapkan pada tahun 2045

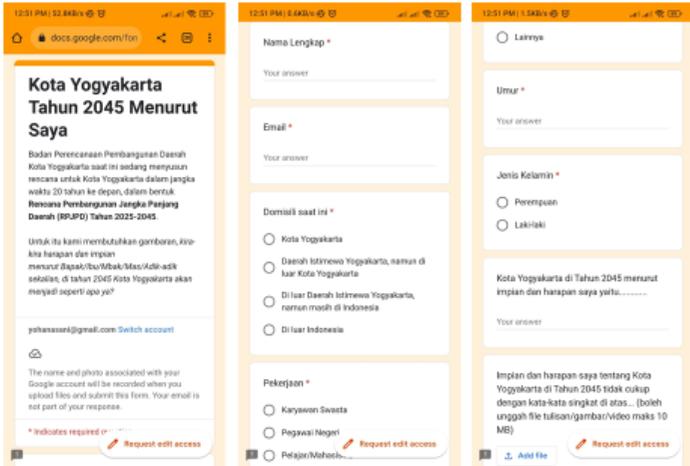


## Partisipasi Masyarakat

[bit.ly/KotaYogyakarta2045](https://bit.ly/KotaYogyakarta2045)



Mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai Kota Yogyakarta yang diharapkan pada tahun 2045 Sampai dengan 30 September 2023



[www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

#### A.1.9. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja

Untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari sisi internal Pemerintah Kota sendiri maupun pihak-pihak dari luar sebagai pemangku kepentingan (Stakeholders). Sesuai dengan program Gandeng Gendong yang memfokuskan pada kolaborasi antara 5 stakeholders

(5K), Bappeda Kota Yogyakarta mewujudkan kolaborasi tersebut ke dalam berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Kota (Pemerintah Kota Yogyakarta ) : berfungsi sebagai pengambil kebijakan, penganggaran, monev program dan Kerjasama dalam rangka Percepatan Pembangunan.

Bappeda Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan. Salah satu Peran Bappeda di sini adalah sebagai pengambil kebijakan perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan Musrenbang.



2. Kampus : Berperan untuk dukungan penguatan SDM pelaku UKM, research and development.

Kolaborasi Bappeda dengan Kampus selain dibentuknya Forum LPPM juga diwujudkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Yogyakarta dalam hal penelitian tematis, KKN, Magang dan juga MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Selain itu juga adanya Dewan Penelitian dan Pengembangan yang anggotanya terdiri dari unsur Perguruan Tinggi untuk mendukung kinerja urusan penelitian dan pengembangan. Selain itu kolaborasi dengan Kampus adalah keterlibatan Perguruan tinggi dalam sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.





3. Kampung : Sebagai basis pelaksanaan dan pengembangan program.

Kolaborasi Bappeda dengan Kampung adalah dengan dibentuknya Forum Kampung dimana Forum Kampung ini merupakan unsur dalam proses perencanaan di wilayah dan juga terlibat dalam sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



4. Komunitas : Konsolidasi inter dan antar komunitas bagi pelaksanaan program dan sosialisasi.

Kolaborasi Bappeda dengan Komunitas diantaranya dengan melibatkan komunitas pada pelaksanaan Musrenbang dan juga dalam FGD serta Konsultasi Publik untuk meminta masukan terkait dengan perencanaan ataupun dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Forum Komunitas Winongo Asri (FKWA), Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajahwong, Komunitas Peduli Sungai Code (Merti Code) adalah beberapa komunitas yang terlibat aktif dalam pembangunan di Kota Yogyakarta.



- Korporat : Penggunaan dan pengembangan produk lokal, promosi, fasilitasi (Forum CSR).

Kolaborasi Bappeda dengan Korporat adalah dengan terbentuknya susunan kepengurusan TSLP . Struktur Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 157 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.20**  
**Struktur Kepengurusan Forum TSL**



Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang berada di Bappeda Kota Yogyakarta menyelenggarakan Musrenbang TSLP. Tujuan Musrenbang Forum TSLP ini adalah untuk menguatkan sinergisitas dan harmonisasi korporasi dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung program strategis pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.



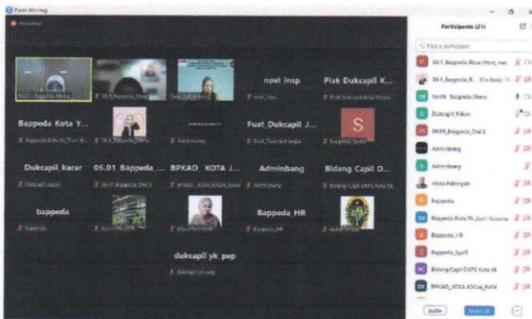
Selain kolaborasi dengan konsep gandeng gendong 5 K, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda Kota Yogyakarta juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul dengan membentuk Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekber Kartamantul).

KARTAMANTUL adalah lembaga bersama Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman Dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bidang pembangunan beberapa sektor sarana dan prasana yang meliputi persampahan, penanganan limbah air, ketersediaan air bersih, jalan, transportasi dan drainase.

Kerja sama melalui Sekber Kartamantul ini diharapkan dapat menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan sarana prasarana perkotaan di tiga pemerintah daerah, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana perkotaan, dan meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada pada tiga daerah.



Disamping itu juga Bappeda melalui bidang/sektoral yaitu bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dan bidang infrastruktur berkolaborasi dengan mitra perangkat daerah dalam pelaksanaan Desk baik Desk Timbal Balik Evaluasi Renja ataupun Desk Penyusunan Renja maupun review Renstra. Dalam pelaksanaan Desk tersebut Bappeda juga melibatkan OPD yang menjadi TAPD Kota Yogyakarta dan Inspektorat serta BPPJ. Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari keberhasilan Bappeda dalam pencapaian sasaran kinerja.



## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2023 sebesar Rp. 13.877.384.436,-00 atau sebesar 94,77% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.642.918.434,00. Realisasi anggaran tersebut di dalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Anggaran belanja apabila dirinci antara belanja gaji dan non gaji dituangkan dalam tabel berikut :



**Tabel 3.22**

**Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	9.116.683.000	8.411.526.682	92,27%

**Tabel 3.23**

**Realisasi Anggaran Belanja diluar Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2023**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.528.544.581</b>	<b>1.477.152.046</b>	<b>96,64</b>
I.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60.213.850</b>	<b>60.165.500</b>	<b>99,92</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.168.000	5.168.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.921.000	2.921.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.478.000	2.478.000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.488.810	1.478.750	99,32
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.488.860	1.458.000	97,92
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.632.000	44.629.000	99,99
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.037.180	2.032.750	99,78
I.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.681.000</b>	<b>16.657.000</b>	<b>99,86</b>
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.675.000	8.670.000	99,94
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	989.000	989.000	100
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	483.000	473.000	97,93
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	715.000	713.000	99,72
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.830.000	4.830.000	100
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	989.000	982.000	99,29
I.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.668.000</b>	<b>4.620.700</b>	<b>98,56</b>
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	567.000	544.700	96,07
15	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	567.000	567.000	100



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	989.000	989.000	100
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	989.000	989.000	100
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	989.000	970.000	98,08
19	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	567.000	561.000	98,94
<b>I.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>66.749.000</b>	<b>66.743.500</b>	<b>99,99</b>
20	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	66.749.000	66.743.500	99,99
<b>I.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>458.217.370</b>	<b>438.620.704</b>	<b>95,72</b>
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.190.000	3.600.000	85,92
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.984.620	79.304.750	81,77
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.036.550	16.952.547	93,99
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.312.200	32.088.790	99,31
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.964.000	2.964.000	100
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.730.000	303.710.617	99,99
<b>I.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>381.617.900</b>	<b>369.112.000</b>	<b>96,72</b>
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.617.900	369.112.000	96,72
<b>I.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.500.000</b>	<b>105.301.957</b>	<b>99,81</b>
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	100
29	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	2.809.957	93,67
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.000.000	97.992.000	99,99
<b>I.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>434.897.461</b>	<b>415.930.685</b>	<b>95,64</b>
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.062.000	116.008.108	96,62
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.460.000	37.296.300	96,97
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.100.000	34.097.700	94,45
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	240.275.461	228.528.577	95,11
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>780.798.795</b>	<b>780.282.700</b>	<b>99,93</b>
<b>II.7</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>362.133.023</b>	<b>361.724.900</b>	<b>99,89</b>



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
35	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	194.257.766	194.086.400	99,91
36	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	44.881.744	44.852.000	99,93
37	Pelaksanaan Konsultasi Publik	6.957.000	6.947.000	99,86
38	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	22.389.000	22.378.000	99,95
39	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	93.647.513	93.461.500	99,80
<b>II.8</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>106.719.372</b>	<b>106.696.300</b>	<b>99,98</b>
40	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	101.266.372	101.244.300	99,98
41	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.453.000	5.452.000	99,98
<b>II.9</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>311.946.400</b>	<b>311.861.500</b>	<b>99,97</b>
42	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	136.174.116	136.148.250	99,98
43	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	175.772.284	175.713.250	99,97
<b>III</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.872.883.706</b>	<b>1.870.114.560</b>	<b>99,85</b>
<b>III.10</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>498.987.440</b>	<b>498.743.310</b>	<b>99,95</b>
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.958.360	59.943.000	99,97
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94.697.720	94.492.750	99,78
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	344.331.360	344.307.560	99,99
<b>III.11</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>418.134.750</b>	<b>416.053.000</b>	<b>99,50</b>
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.642.750	86.555.750	99,90
48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	77.505.000	77.050.000	99,41
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	253.987.000	252.447.250	99,39



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
<b>III.12</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>955.761.516</b>	<b>955.318.250</b>	<b>99,95</b>
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	114.198.488	114.119.500	99,93
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	394.107.488	393.779.250	99,92
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPd)	447.455.540	447.419.500	99,99
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.344.008.352</b>	<b>1.338.308.448</b>	<b>99,57</b>
<b>IV.13</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>120.521.818</b>	<b>120.302.000</b>	<b>99,81</b>
53	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	49.930.275	49.891.000	99,92
54	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	70.591.543	70.411.000	99,74
<b>IV.14</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>453.103.810</b>	<b>451.542.000</b>	<b>99,65</b>
55	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	453.103.810	451.542.000	99,66
<b>IV.15</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>408.440.724</b>	<b>406.456.500</b>	<b>99,51</b>
56	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	205.062.362	203.364.000	99,17
57	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	203.378.362	203.092.500	99,86
<b>IV.16</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>361.942.000</b>	<b>360.007.948</b>	<b>99,46</b>
58	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	361.942.000	360.007.948	99,47
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.526.235.434</b>	<b>5.465.857.754</b>	<b>98,90</b>

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar **Rp. 9.116.683.000,-** sedangkan anggaran non gaji sebesar Rp. **5.526.235.434,-**. Realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. **8.411.526.682,-** atau sebesar 92,27% dari total anggaran gaji dan tunjangan ASN. Hal ini disebabkan karena adanya pagu gaji dan tunjangan untuk PPPK yang masuk dalam formasi baru di Bappeda tetapi tidak ada yang masuk kualifikasi sehingga anggaran tidak terpakai. Sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 705.156.318,- sedangkan realisasi anggaran non gaji sebesar Rp **5.465.857.754,-** atau sebesar 98,90% dari total anggaran sebesar Rp. **5.526.235.434,-**. Sisa anggaran pada belanja non gaji sebesar Rp. 60.377.680,-



Anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar **Rp. 399.769.0853,-** yang terdiri dari program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah serta program penelitian dan pengembangan. Sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar **Rp. 1.528.544.581,-** .

Realisasi anggaran pada program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp. **1.870.114.560,-** atau sebesar **99,85%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **1.872.883.706,-**. Program ini didukung oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. **498.987.440,-** dengan realisasi sebesar Rp. **498.743.310,-** atau sebesar 99,95%, Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. **418.134.750,-** dengan realisasi sebesar Rp. **416.053.000,-** atau sebesar 99,50%, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan anggaran sebesar Rp. **955.761.516,-** dengan realisasi sebesar Rp. **955.318.250,-** atau sebesar 99,95%.

Realisasi anggaran pada Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar Rp. **780.282.700,-** atau sebesar 99,93%, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **780.798.795,-** program penelitian dan pengembangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.344.008.352,-** realisasi sebesar Rp. **1.338.308.448,-** atau sebesar 99,57%. Sedangkan realisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. **1.477.152.046,-** atau sebesar 96,64% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **1.528.544.581,-** .

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.24 berikut:

**Tabel 3.24**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5	98,18	106,14	14.642.918.434	13.877.384.436	94,77
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	AA	109,53			
	Belanja gaji dan tunjangan ASN					9.116.683.000	8.411.526.682	92,27
	Belanja operasional utama					3.997.690.853	3.988.705.708	99,77

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Belanja operasional pendukung					1.528.544.581	1.477.152.046	96,64
<b>Total Belanja</b>						<b>14.642.918.434</b>	<b>13.877.384.436</b>	<b>94,77</b>

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.25**  
**Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah meningkat	<b>99,93%</b>
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kemanfaatan Analisa data dalam perencanaan pembangunan	<b>99,85%</b>
			Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat	
			Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	<b>99,57%</b>
			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat	<b>96,64%</b>

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik (106,14%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.



# BAB IV | Penutup

# BAB 4

## Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-1 atau tahun pertama dari Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kinerja perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan, realisasi kinerja Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebesar 98,18%, tingkat capaian sebesar 106,14% sedangkan untuk sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III adalah dengan pedikat AA.
2. Realisasi kinerja Bappeda Kota Yogyakarta telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagai tahun pertama periode Renstra 2023-2026 dan berawalnyaa RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yaitu sebesar 92,5%, dengan efisiensi anggaran sebesar 5,33%.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti tidak tercapainya target sasaran perangkat daerah maupun target sasaran program mitra perangkat daerah dimana dua hal tersebut merupakan bagian dari formula perhitungan sasaran perangkat daerah.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pola koordinasi Bappeda selaku pengampu perencanaan dengan OPD dalam lingkup Sekretariat Daerah selaku pengampu kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Asisten.
2. Reviu dan evaluasi target kinerja perangkat daerah mitra sebagai bagian dari pencapaian target sasaran daerah.
3. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (SIMONEVA)
4. Meningkatkan peran inovasi dan penelitian terhadap pencapaian target pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas perencana, baik internal Bappeda maupun Pemkot Yogyakarta secara keseluruhan



Adapun pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Desk Sasaran Daerah secara periodik pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
2. Pendampingan intensif dalam pelaksanaan desk metadata dan pohon kinerja
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas dengan mengoptimalkan pelaksanaan desk timbal balik.
4. Melaksanakan pendampingan dalam proses perencanaan kinerja tahunan dengan melaksanakan desk Renja, Renstra secara intensif.
5. Optimalisasi Forum Rapat Dinas untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan masing-masing kepala perangkat daerah.
6. Melaksanakan secara berkelanjutan Bappeda Corporate University untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappeda.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian yang dilaksanakan selama ini terkait keuangan, barang serta capaian fisik dan keuangan yang lebih berkualitas dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi setiap bulan.



# LAMPIRAN

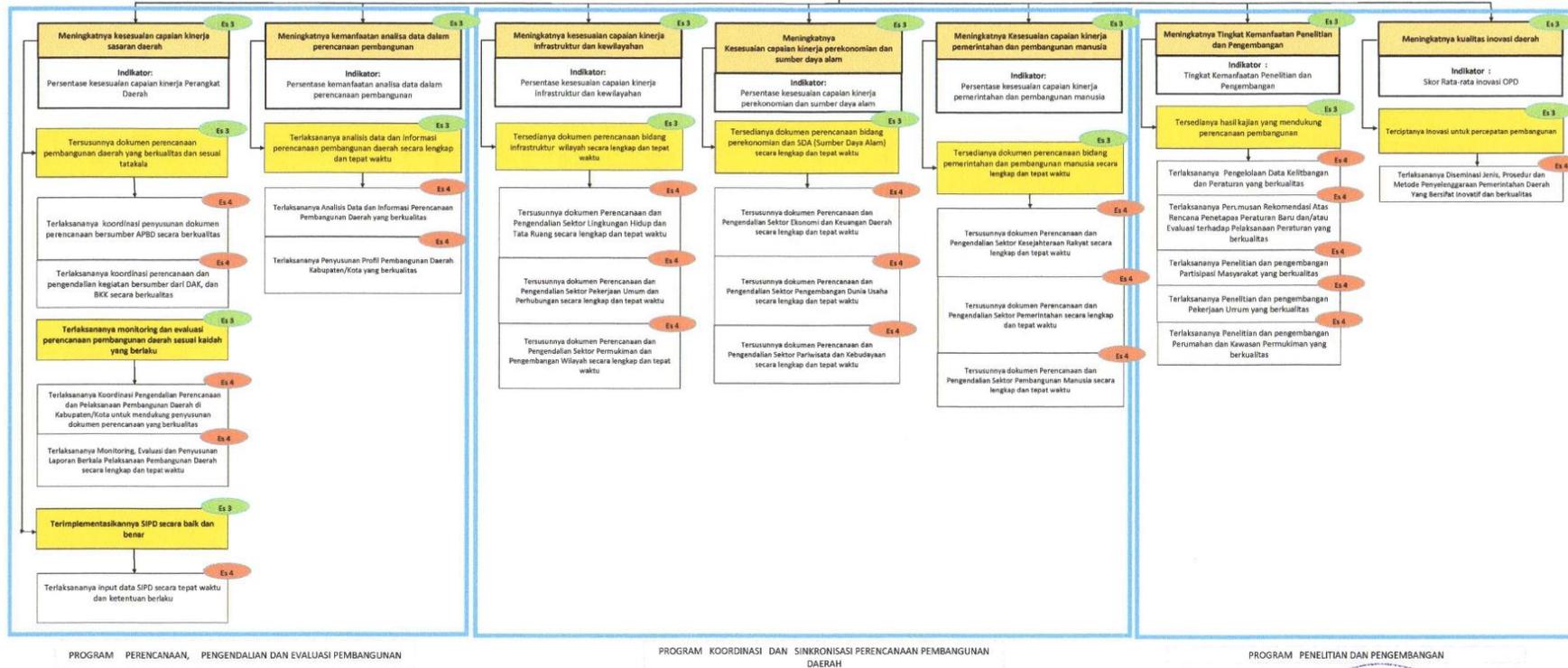


Lampiran 1. Cascading/Pohon Kinerja



CASCADING POHON KINERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat  
INDIKATOR:  
Indeks Perencanaan Pembangunan



Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, S.T., M.T.  
NIP. 19720306196031004



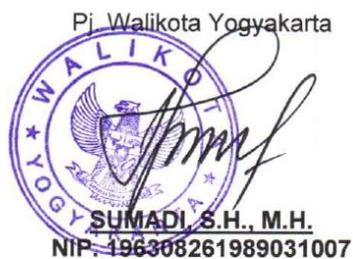
## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5 Skala 0-100
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90,67

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 792.398.795,-	APBD TA. 2023
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.943.065.706,-	APBD TA. 2023
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.1.204.068.352,-	APBD TA. 2023
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.10.178.532.751,-	APBD TA. 2023
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 14.118.065.604,-</b>	

Yogyakarta, 09 JAN 2023

Pj. Walikota Yogyakarta



**SUMADI, S.H., M.H.**  
NIP. 196308261989031007

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah



**AGUS TRI HARYONO, ST., MT**  
NIP. 197203061996031004





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦺꦴꦩꦒꦏꦂꦠꦏꦪ  
ꦧꦁꦠꦺꦤꦥꦺꦤꦁꦧꦺꦩꦧꦁꦸꦤꦠꦤꦺꦴꦩꦩꦏꦺꦴꦩꦒꦏꦂꦠꦏꦪ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515207, 515865, 562682 Fax (0274) 554432  
EMAIL : [bappeda@jogjakota.go.id](mailto:bappeda@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS TRI HARYONO, ST.,MT

Jabatan : Kepala Bappeda

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SINGGIH RAHARJO, SH.,M.Ed

Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Pihak Kedua  
  
SINGGIH RAHARJO, SH.,M.Ed

Pihak Pertama  
  
AGUS TRI HARYONO, ST.,MT  
NIP. 19720306199603100



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5 Skala 0-100
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

No	Program	Perubahan Anggaran 2023	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 780.798.795,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.872.883.706,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.344.008.352,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.645.227.581,-	PERUBAHAN APBD TA.2023
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp. 14.642.918.434,-</b>	

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Pj. Wali Kota Yogyakarta  
  
**SINGGIH RAHARJO, SH.,M.Ed**

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
  
**AGUS TRI HARYONO, ST.,MT**  
NIP. 197203061996031004



Lampiran : Pengukuran Kinerja Eselon II Triwulan I

PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan I			Keterangan	Program	Pagu	Triwulan I		Unit Kerja	Keterangan
					Target	Realisasi	%				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92.5 Skala 0-100	60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah	92.5 Skala 0-100	95.33 Skala 0-100	103.17	menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, karena capaian kinerja sasaran perangkat daerah bappeda baru bisa dihitung setelah tw 4 berakhir	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	792.398.795,00	120.567.500,00	15,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.943.065.706,00	501.993.000,00	25,84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.204.068.352,00	59.574.068,00	4,95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.178.532.751,00	1.671.094.256,00	16,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Faktor Pendorong:**

- =>koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah baik dalam desk perencanaan maupun desk pengendalian serta pendampingan kegiatan strategis mitra perangkat daerah
- =>Pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal Bappeda dan capaian kinerja Bappeda terlaksana sesuai dengan perencanaan.

**Uraian Permasalahan:**

- =>kinerja bappeda tergantung dengan capaian kinerja mitra perangkat daerah
- =>Belum adanya kejelasan untuk pelaksanaan RB OPD sampai dengan triwulan I, pelaksanaan RB baru RB Tematik untuk tingkat Kota.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- =>pola koordinasi lebih diintensifkan
- =>pendokumentasian kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan



Yogyakarta, 5 April 2023  
Kepala

Agus Tri Heryono, ST, MT  
NIP. 197203061996031004



Lampiran : Pengukuran Kinerja Eselon II Triwulan II

PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan II			Keterangan	Program	Pagu	Triwulan II		Unit Kerja	Keterangan
					Target	Realisasi	%				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92.5 Skala 0-100	60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah	92.5 Skala 0-100	95.33 Skala 0-100	103.17	menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, karena capaian kinerja sasaran perangkat daerah bappeda baru bisa dihitung setelah tw 4 berakhir	PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	792.398.795,00	327.916.000,00	41,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.943.065.706,00	785.139.250,00	40,41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.204.068.352,00	273.802.098,00	22,74	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.178.532.751,00	4.777.745.657,00	46,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Faktor Pendorong:**

- =>koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah baik dalam desk perencanaan maupun desk pengendalian serta pendampingan kegiatan strategis mitra perangkat daerah
- =>Pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal Bappeda dan capaian kinerja Bappeda terlaksana sesuai dengan perencanaan.

**Uraian Permasalahan:**

- =>kinerja bappeda tergantung dengan capaian kinerja mitra perangkat daerah
- =>Belum adanya kejelasan untuk pelaksanaan RB OPD sampai dengan triwulan II, pelaksanaan RB baru RB Tematik untuk tingkat Kota.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- =>pola koordinasi lebih diintensifikan
- =>Menunggu informasi dari Tim Kota untuk pelaksanaan RB OPD.



Yogyakarta, 5 Juli 2023  
Kepala

Agus Tri Haryono, ST, MT  
NIP. 197203061996031004



Lampiran : Pengukuran Kinerja Eselon II Triwulan III

PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan III			Keterangan	Program	Pagu	Triwulan III		Unit Kerja	Keterangan
					Target	Realisasi	%				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92.5 Skala 0-100	60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah	92.5 Skala 0-100	95.33 Skala 0-100	103.17	menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, karena capaian kinerja sasaran perangkat daerah bappeda baru bisa dihitung setelah tw 4 berakhir	PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	792.398.795,00	472.340.250,00	59,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.943.065.706,00	1.281.085.543,00	65,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.204.068.352,00	552.735.098,00	45,91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.178.532.751,00	6.892.154.309,00	67,71	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Faktor Pendorong:**

- =>kordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah baik dalam desk perencanaan maupun desk pengendalian serta pendampingan kegiatan strategis mitra perangkat daerah
- =>Pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal Bappeda dan capaian kinerja Bappeda terlaksana sesuai dengan perencanaan.

**Uraian Permasalahan:**

- =>kinerja bappeda tergantung dengan capaian kinerja mitra perangkat daerah
- =>Penyusunan perencanaan RB General terialu mepet dengan pelaksanaan monevnya dan instrument monev juga belum ada yang baku

**Rencana Tindak Lanjut:**

- =>pola koordinasi lebih diintensifkan
- =>Menunggu informasi dari Tim Kota untuk pelaksanaan RB General OPD

Yogyakarta, 5 Oktober 2023  
Kepala



Agus Tri Haryono, ST, MT  
NIP. 197203061996031004





Lampiran : Pengukuran Kinerja Eselon II Triwulan IV

PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV			Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Unit Kerja	Keterangan
					Target	Realisasi	%				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5 Skala 0-100	60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah	92,5 Skala 0-100	98,16 Skala 0-100	106,12		PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	780.798.795,00	780.282.700,00	99,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.872.883.706,00	1.870.114.580,00	99,85	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.344.008.352,00	1.338.308.448,00	99,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.645.227.581,00	9.888.878.728,00	92,89	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Faktor Pendorong:**

- =>koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah baik dalam desk perencanaan maupun desk pengendalian serta pendampingan kegiatan strategis mitra perangkat daerah
- =>Pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal Bappeda dan capaian kinerja Bappeda terlaksana sesuai dengan perencanaan.

**Uraian Permasalahan:**

- =>kinerja bappeda tergantung dengan capaian kinerja mitra perangkat daerah
- =>Penyusunan perencanaan RB General terlalu mepet dengan pelaksanaan monevnya dan instrument monev juga belum ada yang baku

**Rencana Tindak Lanjut:**

- =>-Pola koordinasi lebih diintensifkan -Kegiatan disesuaikan dengan tatakala
- =>Menunggu informasi dari Tim Kota untuk pelaksanaan RB General OPD

Yogyakarta, 5 Januari 2024  
Kepala



Agus Tri Haryono, ST, MT  
NIP. 197203061996031004





Lampiran 4. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2022

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022  
Bappeda Kota Yogyakarta

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progrss Pelaksanaan
1	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akan dilaksanakan evaluasi internal secara menyeluruh sesuai ketentuan perundangan sampai dengan level inividu serta memanfaatkannya untuk perbaikan kinerja	12 bulan	Januari- Desember	Sekretaris dan Kepala Bidang	Telah dilaksanakan evaluasi secara berkala untuk memantau progress pelaksanaan kegiatan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Evaluasi Capaian Fisik dan Keuangan setiap bulan.</li> <li>2. Pelaksanaan Rekonsiliasi SPJ/Keuangan yang dilaksanakan setiap bulan.</li> <li>3. Pelaksanaan Desk Timbal Balik setiap Triwulan.</li> <li>4. Pelaksanaan Desk Sasaran Daerah</li> <li>5. Pelaksanaan penilaian kinerja ASN sampai dengan level individu secara berjenjang dari Pelaksana (Staf), Ketua Tim Kerja/Struktural Eselon 4 dan Eselon 3 (Kabid/Sekretaris).</li> </ol>

Kepala  
Bappeda Kota Yogyakarta  
  
 Agus Tri Haryono, ST.,MT  
 NIP. 19720306 199603 1 004





## Penilaian Kinerja Individu ASN Berprestasi Bappeda Tahun 2023

### 1. Level Kabid/Sekretaris

Dinilai oleh: Kepala Bappeda YK

#### Google Form Penilaian:

**PENILAIAN ASN BERPRESTASI BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - KATEGORI KABID/SEKRETARIS**

Keterangan:  
Yang menilai adalah Kepala Badan  
Penilaian kriteria dengan isian skor 1 - 4 dari terendah-tertinggi

Nama Kabid/Sekretaris yang diusulkan Drop-down

- 1. TRI RETNANI, S.Si., M.T. X
- 2. YOHANASANI WIDAYATSARI, S.T. X
- 3. AGUS SALIM, S.E., M.A. X
- 4. AGUSTIN WIJAYANTI, S.Si., X
- 5. SITI NURSANTI IRRIANI, S.T., M.Eng. X
- 6. Dr. DANANG YULISAKSONO, S.T., M.T. X
- 7. Tambahkan opsi

4. Harmonis \*

1

2

3

4

5. Loyal \*

1

2

3

4

6. Adaptif \*

1

2

3

4

7. Kolaboratif \*

1

2

3

4

8. Kepemimpinan \*

1

2

3

4

9. Kedisiplinan \*

1

2

3

4

1. Berorientasi Pelayanan \*

1

2

3

4

2. Akuntabel \*

1

2

3

4

3. Kompeten \*

1

2

3

4

#### Hasil Penilaian:

Nama Kabid/Sekretaris yang diusulkan	1. Berorientasi Pelayanan	2. Akuntabel	3. Kompeten	4. Harmonis	5. Loyal	6. Adaptif	7. Kolaboratif	8. Kepemimpinan	9. Kedisiplinan	Nilai rata-rata	Peringkat
TRI RETNANI, S.Si., M.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	1
Dr. DANANG YULISAKSONO, S.T., M.T.	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89	2
SITI NURSANTI IRRIANI, S.T., M.Eng.	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3,78	3
AGUS SALIM, S.E., M.A.	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3,67	4
YOHANASANI WIDAYATSARI, S.T.	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3,56	5
AGUSTIN WIJAYANTI, S.Si.,	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3,44	6

#### ASN Berprestasi Bappeda 2023 Kategori Kabid/Sekretaris:

TRI RETNANI, S.Si., M.T.





**b. Penentuan Hasil Penilaian ASN Berprestasi Bappeda Kategori Ketua Tim Kerja/Struktural Eselon IV**

Dinilai oleh: Kabid/Sekretaris

**Google Form Penilaian:**

**PENILAIAN ASN BERPRESTASI BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - KATEGORI KETUA TIM KERJA/STRUKTURAL ESELON IV**

Keterangan:  
Yang menilai adalah Kabid/Sekretaris  
Penilaian kriteria dengan isian skor 1 - 4 dari terendah-tertinggi

**Nama Ketua Tim Kerja/Struktural Eselon IV yang diusulkan \***

- RIYANTINI, S.E. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,92% SKP: 109,55 (Baik)
- DWI SULISTYOWATI, S.Si., M.A. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,98% SKP: 100,26 (Baik)
- ENI KUSRINI, S.Si. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,78% SKP: 99,18 (Baik)
- ITMAM FADHLAN, S.Si., M.Ec.Dev. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,41% SKP: 110,66 (Sangat B..)
- E. SINTA HERMAWATI, S.T., M.U.R.P. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,99% SKP: 107,8 (Baik)
- MUSTIKA PARTIWI, S.Si. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,47% SKP: 106,38 (Baik)

**1. Berorientasi Pelayanan \***

1  
 2  
 3  
 4

**2. Akuntabel \***

1  
 2  
 3  
 4

**3. Kompeten \***

1  
 2  
 3  
 4

**4. Harmonis \***

1  
 2  
 3  
 4

**5. Loyal \***

1  
 2  
 3  
 4

**6. Adaptif \***

1  
 2  
 3  
 4

**7. Kolaboratif \***

1  
 2  
 3  
 4

**8. Kepemimpinan \***

1  
 2  
 3  
 4

**9. Kedisiplinan \***

1  
 2  
 3  
 4

**Hasil Penilaian:**

Nama Ketua Tim Kerja/Struktural Eselon IV yang diusulkan	1. Berorientasi Pelayanan	2. Akuntabel	3. Kompeten	4. Harmonis	5. Loyal	6. Adaptif	7. Kolaboratif	8. Kepemimpinan	9. Kedisiplinan	Nilai Rata-rata
MUSTIKA PARTIWI, S.Si. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,47% SKP: 106,38 (Baik)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,89
ENI KUSRINI, S.Si. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,78% SKP: 99,18 (Baik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RIYANTINI, S.E. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,92% SKP: 109,55 (Baik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
E. SINTA HERMAWATI, S.T., M.U.R.P. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,99% SKP: 107,8 (Baik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DWI SULISTYOWATI, S.Si., M.A. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,98% SKP: 100,26 (Baik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ITMAM FADHLAN, S.Si., M.Ec.Dev. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,41% SKP: 110,66 (Sangat Baik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Terdapat 5 nama dengan hasil penilaian seri, maka penilaian dilakukan dengan memperhatikan Capaian Fisik, Capaian keuangan, dan SKP.

	Capaian Fisik	Capaian Keuangan	SKP	Nilai Rata-rata	Urutan
ENI KUSRINI, S.Si. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,78% SKP: 99,18 (Baik)	100	99,78	99,18	99,65	5
RIYANTINI, S.E. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,92% SKP: 109,55 (Baik)	100	99,92	109,55	103,16	2
E. SINTA HERMAWATI, S.T., M.U.R.P. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,99% SKP: 107,8 (Baik)	100	99,99	107,8	102,60	3
DWI SULISTYOWATI, S.Si., M.A. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,98% SKP: 100,26 (Baik)	100	99,98	100,26	100,08	4
ITMAM FADHLAN, S.Si., M.Ec.Dev. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,41% SKP: 110,66 (Sangat Baik)	100	99,41	110,66	103,36	1

**Hasil Penilaian Akhir:**

Urutan	Nama
1	ITMAM FADHLAN, S.Si., M.Ec.Dev. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,41% SKP: 110,66 (Sangat Baik)
2	RIYANTINI, S.E. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,92% SKP: 109,55 (Baik)
3	E. SINTA HERMAWATI, S.T., M.U.R.P. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,99% SKP: 107,8 (Baik)
4	DWI SULISTYOWATI, S.Si., M.A. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,98% SKP: 100,26 (Baik)
5	ENI KUSRINI, S.Si. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,78% SKP: 99,18 (Baik)
6	MUSTIKA PARTIWI, S.Si. - Capaian Kinerja Fisik: 100% Keuangan: 99,47% SKP: 106,38 (Baik)

**ASN Berprestasi Bappeda 2023 Kategori Ketua Tim Kerja/Struktural Eselon IV:**

ITMAM FADHLAN, S.Si., M.Ec.Dev





## b. Penentuan Hasil Penilaian ASN Berprestasi Bappeda Kategori Pelaksana/Staf

Dinilai oleh: Ketua Tim Kerja/Kabid/Sekretaris

### Google Form Penilaian:

**PENILAIAN ASN BERPRESTASI BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - KATEGORI PELAKSANA/STAF**

**Keterangan:**  
 Yang menilai adalah Ketua Tim Kerja, Kabid/Sekretaris  
 Penilaian kriteria dengan isian skor 1 - 4 dari terendah-tertinggi

Email \*  
 Alamat email valid  
Formulir ini mengumpulkan alamat email. [Ubah setelan](#)

**Nama Pelaksana/Staf yang diusulkan \***

- WINARINI, S.Geo
- AZKI SYAIFI AJI, S.Si.
- ADHITYA KUSUMA ZAENARDI, S.E.
- GURUH ADHI KURNIAWAN, S.T.
- FABIAN PRATAMA KUSUMAH, S.I.P.
- HUSNA WIDYASTUTI, A.Md.

**1. Berorientasi Pelayanan \***

1  
 2  
 3  
 4

**2. Akuntabel \***

1  
 2  
 3  
 4

**3. Kompeten \***

1  
 2  
 3  
 4

**4. Harmonis \***

1  
 2  
 3  
 4

**5. Loyal \***

1  
 2  
 3  
 4

**6. Adaptif \***

1  
 2  
 3  
 4

**7. Kolaboratif \***

1  
 2  
 3  
 4

**8. Kepemimpinan \***

1  
 2  
 3  
 4

**9. Kedisiplinan \***

1  
 2  
 3  
 4

### Hasil Penilaian:

Nama Pelaksana/Staf yang diusulkan	1. Berorientasi Pelayanan	2. Akuntabel	3. Kompeten	4. Harmonis	5. Loyal	6. Adaptif	7. Kolaboratif	8. Kepemimpinan	9. Kedisiplinan	Nilai Rata-rata
ADHITYA KUSUMA ZAENARDI, S.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ADHITYA KUSUMA ZAENARDI, S.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ADHITYA KUSUMA ZAENARDI, S.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GURUH ADHI KURNIAWAN, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GURUH ADHI KURNIAWAN, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,89
GURUH ADHI KURNIAWAN, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AZKI SYAIFI AJI, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FABIAN PRATAMA KUSUMAH, S.I.P.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

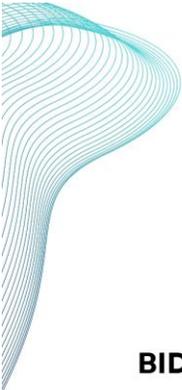
### ASN Berprestasi Bappeda 2023 Kategori Pelaksana/Staf:

ADHITYA KUSUMA ZAENARDI, S.E.





## Sertifikat Capaian Kinerja Bidang dan Sekretariat Bappeda Tahun 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

# PIAGAM PENGHARGAAN

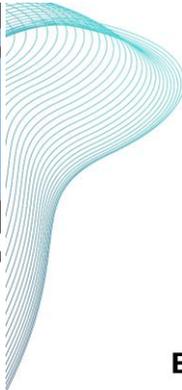
Dengan Ini Diberikan Kepada:

## **BIDANG RISET INOVASI DAERAH DAN PENGENDALIAN**

---

Atas Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta untuk  
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Tahun 2023 Dengan nilai 107,17% (Sangat Tinggi)

**KEPALA**  
  
**AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.**  
NIP. 197203061996031004



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

# PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan Ini Diberikan Kepada:

## **BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

---

Atas Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta untuk  
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Tahun 2023 Dengan nilai 101,01% (Sangat Tinggi)

**KEPALA**  
  
**AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.**  
NIP. 197203061996031004





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

## **PIAGAM PENGHARGAAN**

Dengan Ini Diberikan Kepada:

### **BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

Atas Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta untuk  
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Tahun 2023 Dengan nilai 102,91% (Sangat Tinggi)

**KEPALA**



**AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.**  
NIP. 197203061996031004



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

## **PIAGAM PENGHARGAAN**

Dengan Ini Diberikan Kepada:

### **BIDANG PEREKONOMIAN**

Atas Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta untuk  
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Bidang Perekonomian  
Tahun 2023 Dengan nilai 102,85% (Sangat Tinggi)

**KEPALA**



**AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.**  
NIP. 197203061996031004





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

## **PIAGAM PENGHARGAAN**

Dengan Ini Diberikan Kepada:

### **BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

Atas Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2023 Dengan nilai 103,05% (Sangat Tinggi)

**KEPALA**



**AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.**  
NIP. 197203061996031004



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

## **PIAGAM PENGHARGAAN**

Dengan Ini Diberikan Kepada:

### **SEKRETARIAT**

Atas Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 Dengan nilai 97,87% (Sangat Tinggi)

**KEPALA**



**AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.**  
NIP. 197203061996031004

